

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

**KEWENANGAN BADAN PERTANAHAN NASIONAL KOTA
SUBULUSSALAM DALAM MENANGANI KASUS PERTANAHAN
AKIBAT KONFLIK MENURUT PERATURAN PRESIDEN NOMOR 20
TAHUN 2015 TENTANG BADAN PERTANAHAN NASIONAL**

SKRIPSI

Diajukan sebagai salah satu syarat untuk memperoleh

Gelar Sarjana Hukum pada Jurusan Ilmu Hukum

Fakultas Syariah Dan Hukum



Oleh:

HANALDI SYAH
Nim :11427100477

PROGRAM S 1

JURUSAN ILMU HUKUM

FAKULTAS SYARIAH DAN HUKUM

UNIVERSITAS ISLAM NEGERI SULTAN SYARIF KASIM RIAU

2019

PERSETUJUAN

Skripsi Dengan Judul: KEWENANGAN BADAN *PERTANAHAN NASIONAL
KOTA SUBULUSSALAM DALAM MENANGANI KASUS PERTANAHAN AKIBAT
KONFLIK MENURUT PERATURAN PRESIDEN NOMOR 20 TAHUN 2015 TENTANG
BADAN PERTANAHAN NASIONAL.

Yang Tulis Oleh:

NAMA : HANALDISYAH

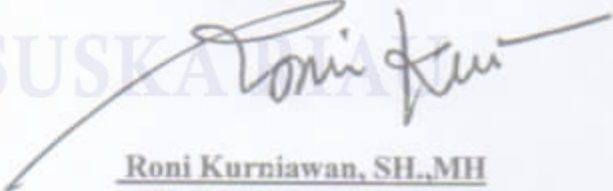
NIM : 11427100477

PROGRAM STUDI : ILMU HUKUM

Dapat diterima dan disetujui untuk disajikan dalam sidang munaqasah Fakultas
Syariah Dan Hukum Universitas Islam Negeri Sultan Syarif Kasim Riau.

Pekanbaru, 6 Oktober 2019

Pembimbing Skripsi


Roni Kurniawan, SH.,MH
NIK.130112054

© Hak cipta milik UIN Suska Riau

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

State Islamic University of Sultan Syarif Kasim Riau



UIN SUSKA RIAU



Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

© Hak cipta milik UIN Suska Riau

State Islamic University of Sultan Syarif Kasim Riau

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

PENGESAHAN

Skripsi dengan judul "KEWENANGAN BADAN PERTANAHAN NASIONAL KOTA SUBULUSSALAM DALAM MENANGANI KASUS PERTANAHAN YANG TERJADI AKIBAT KONFLIK MENURUT PERATURAN PRESIDEN NOMOR 20 TAHUN 2015 TENTANG BADAN PERTANAHAN NASIONAL", yang ditulis oleh:

Nama : HANALDI SYAH
NIM : 11427100477
Program Studi : ILMU HUKUM

Telah dimunaqasahkan pada:

Hari / Tanggal : Selasa, 10 Desember 2019
Waktu : 08.00 WIB
Tempat : Ruang Sidang Munaqasyah Fakultas Syariah dan Hukum

Telah diperbaiki sesuai dengan permintaan Tim Penguji Munaqasyah Fakultas Syariah dan Hukum Universitas Islam Negeri Sultan Syarif Kasim Riau.

Pekanbaru, 12 Desember 2019 M
TIM PENGUJI MUNAQASYAH

Ketua
Irdaus, SH., MH
Sekretaris
Ani Alizon, SH., MH
Penguji I
Asir, S.HL., MH
Penguji II
Yafrinaldi, SH., MA

[Handwritten signatures of the examiners]



Mengetahui:
Dekan Fakultas Syariah dan Hukum

[Signature of Dr. Drs. H. Hajar, M.Ag]
Dr. Drs. H. Hajar, M.Ag
NIP. 19580712 198603 1 005



SURAT PERNYATAAN KEABSAHAN SKRIPSI

© Hak Cipta milik UIN Suska Riau

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

Saya yang bertanda tangan dibawah ini

: HANALDI SYAH

: 11427100477

Tempat Tanggal Lahir

: MEDAN, 25 FEBRUARI 1996

Program Studi

: ILMU HUKUM

Fakultas

: SYARIAH DAN HUKUM

Universitas

: UIN SUSKA RIAU

Dengan ini menyatakan bahwa skripsi yang berjudul "KEWENANGAN BADAN PERTANAHAN NASIONAL KOTA SUBULUSSALAMN DALAM MENANGANI KASUS PERTANAHAN AKIBAT KONFLIK MENURUT PERATURAN PRESIDEN NOMOR 20 TAHUN 2015 TENTANG BADAN PERTANAHAN NASIONAL" adalah benar karya saya sendiri atau bukan plagiat hasil karya orang lain.

Apabila dikemudian hari terbukti bahwa skripsi ini bukan hasil karya saya sendiri atau plagiat hasil karya orang lain, maka saya bersedia menerima sanksi sesuai ketentuan perundang-undangan yang berlaku.

Demikian surat pernyataan ini saya buat untuk dapat dipergunakan sebagaimana mestinya.

UIN SUSKA RIAU

Pekanbaru, 16 Desember 2019

Yang membuat pernyataan



HANALDI SYAH
NIM. 11427100477



1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

ABSTRAK

Penelitian ini membahas tentang Kewenangan Badan Pertanahan Nasional Kota Subulussalam Dalam Menangani Kasus Pertanahan akibat konflik Menurut Peraturan Presiden Nomor 20 Tahun 2015 Tentang Badan Pertanahan Nasional. Pada dasarnya peraturan ini dibentuk untuk menangani permasalahan tentang tanah yang terjadi di masyarakat, namun pada kenyataannya Badan Pertanahan Nasional dalam penyelesaian persengketaan tanah tidaklah semudah itu, mengingat banyaknya kasus tentang persengketaan tanah yang terjadi di beberapa wilayah Indonesia yang masih berlanjut dan belum terselesaikan sampai saat ini. Seperti kasus yang terjadi di desa Bawan kota Subulussalam yang belum ada penyelesaian sampai saat ini.

Adapun rumusan masalah dalam penelitian ini yaitu bagaimana Kewenangan Badan Pertanahan Nasional Kota Subulussalam Dalam Menangani Kasus Pertanahan akibat konflik yang terjadi di desa Bawan Kota Subulussalam serta yang menjadi hambatan bagi badan pertanahan Nasional Kota Subulussalam dalam menangani konflik pertanahan yang terjadi di desa Bawan kota Subulussalam.

Jenis Penelitian yang dilakukan adalah penelitian yuridis sosiologis, yaitu dengan cara melakukan survey langsung kelapangan untuk mengumpulkan data primer dan data sekunder yang didapat langsung dari responden melalui observasi, wawancara, dan kajian pustaka untuk dijadikan data atau informasi sebagai bahan penulisan penelitian ini.

Hasil penelitian menunjukkan bahwa, tidak adanya tindakan tegas yang dilakukan oleh Badan Pertanahan Nasional kota Subulussalam atau dalam hal ini BPN tidak menggunakan kewenangan yang dimilikinya dalam menangani permasalahan sengketa lahan yang terjadi di desa Bawan kota Subulussalam. Ini terbukti dari tidak adanya penyelesaian persengketaan tanah antara masyarakat dengan lahan yang dikuasai oleh PT.Indo Sawit Perkasa yang masih berlanjut sampai saat ini



1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

KATA PENGANTAR

Bismillahirrohmanirrahim.....

Dengan mengucapkan syukur Alhamdulillah, puja puji dan syukur atas kehadiran Allah SWT, Tuhan Semesta Alam, pemilik segala karunia rahmat dan nikmat, atas segala kehendak-Nya sehingga penulisan skripsi yang berjudul **"KEWENANGAN BADAN PERTANAHAN NASIONAL KOTA SUBULUSSALAM DALAM MENANGANI KONFLIK PERTANAHAN MENURUT PERATURAN PRESIDEN NOMOR 20 TAHUN 2015 TENTANG BADAN PERTANAHAN NASIONAL.** Yang sederhana dan penuh dengan kekurangan ini dapat dirapungkan pada waktunya. Sebagai salah satu syarat untuk memperoleh gelar Sarjana Hukum pada Fakultas Syariah dan Hukum Universitas Islam Negeri Sultan Syarif Kasim, Riau. Sholawat dan salam selalu tercurah kepada Nabi Allah, Muhammad SAW, sebagai Rasul yang diutus oleh Allah untuk menunjukkan jalan kebenaran dan jalan yang diridhoi oleh Allah SWT juga menjadi suri tauladan bagi seluruh umat muslim di dunia.

Dalam pembuatan skripsi ini penulis telah mendapatkan bantuan dari berbagai pihak, baik secara moril maupun materil yang sangat berharga. Oleh karena itu selayaknya penulis mengucapkan terima Kasih dan penghargaan yang sebesar-besarnya Kepada:

1. Ayahanda tercinta NGATEMAN dan ibunda tercinta JURIYAH HATISYAH yang selalu menjadi motivasi terbesar bagi penulis dan begitu tulus dan bersusah payah mengasuh dan mendidik serta mengorbankan



Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

materi dan moral demi penulis untuk menyelesaikan kuliah dan do'a beserta dukungan yang senantiasa diberikan kepada penulis sehingga skripsi ini selesai.

2. Bapak Rektor Prof. Dr. H. Akhmad Mujahidin, S.Ag M. Ag., Beserta jajarannya yang telah memberikan kesempatan kepada penulis untuk menuntut ilmu di UIN Suska Riau.
3. Bapak Dr. Drs. H. Hajar, M.Ag. Dekan fakultas Syari'ah Dan Hukum, Bapak Dr. Drs. H. Heri Sunandar, MCL. Wakil Dekan I Fakultas Syari'ah dan hukum, Bapak Dr. Wahidin, M.Ag. Wakil Dekan II Fakultas syari'ah dan hukum, Bapak Dr. H, Maghfirah. MA, Wakil dekan Fakultas Syariah Dan Hukum UIN Suska Riau.
4. Bapak Firdaus, SH.,MH Selaku ketua jurusan ilmu hukum dan bapak Muslim, S.Ag., M.Hum Selaku sekretaris ilmu hukum.
5. Bapak Roni Kurniawan, SH.,MH selaku Pembimbing Akademis yang telah sabar dalam memberikan arahan serta bimbingan dalam penyelesaian penulisan skripsi ini.
6. Bapak/ Ibu dosen yang telah memberikan ilmunya kepada penulis. Sehingga penulis bisa memahami, dan bisa mengerti apa yang sebelumnya tidak dimengerti sama sekali oleh penulis. Semua Ilmu yang telah diberikan sangat berarti dan berharga demi kesuksesan di masa mendatang.
7. Semua pihak yang telah memberikan dukungan dan bantuan dalam menyelesaikan skripsi ini. Semoga semua bantuan, dukungan, do'a yang



Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

telah diberikan menjadi amal baik serta mendapat ridha dan balasan dari Allah SWT.

8. Kepada semua sahabat terbaik saya ilmu hukum 5, Perumahan Asta Karya Blok i 16, dan HTN C yang telah memberikan motivasi dalam penyelesaian Skripsi ini.

Harapannya Smoga Allah SWT membalas kebaikan mereka dan membalasnya dengan kebaikan yang jauh lebih baik. Semoga Skripsi ini bermanfaat dan bisa menambah khasanah ilmu pengetahuan. Terima Kasih.

Penulis menyadari bahwa dalam penulisan ini jauh dari kata sempurna, dan masih banyak kekurangan dari segi ilmiah, isi, bahasa maupun konsep penyusunan skripsi ini. Oleh karena itu penulis sangat mengharapkan saran sserta kritik demi kesempurnaan skripsi ini sehingga memperoleh mamfaat. Akhir kata semoga skripsi ini dapat memberikan mamfaat bagi pembacanya

Aamiin Ya Rabbal Aamin.....

Wassalamu'alaikum, Wr, Wb.....

Pekanbaru, 6 November 2019

penulis

Hanaldisyah

DAFTAR ISI

[illegible]

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

A. Kewenangan Badan Pertanahan Nasional Kota Subulussalam Dalam Menangani Kasus Pertanahan Akibat Konflik Menurut Peraturan Presiden No 20 Tahun 2015 Tentang Badan Pertanahan Nasional	50
B. Hambatan Badan Pertanahan Nasional Kota Subulussalam Dalam Menangani Konflik Pertanahan Yang Terjadi di Desa Pasir Belo Kota Subulussalam	60
BAB V KESIMPULAN DAN SARAN	
A. Kesimpulan.....	64
B. Saran	64

DAFTAR PUSTAKA
LAMPIRAN
BIOGRAFI PENULIS

UIN SUSKA RIAU



Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

BAB I

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang Masalah

Republik Indonesia atau Negara Kesatuan Republik Indonesia (NKRI) yang lebih umum disebut Indonesia adalah Negara di Asia Tenggara yang dilintasi khatulistiwa yang berada di benua Asia serta Australia, serta antara Samudra Pasifik dan samudra Hindia, Indonesia adalah Negara Kepulauan terbesar didunia yang terdiri dari 17.504 pulau, dengan populasi hampir 207.054.853 juta jiwa pada tahun 2018. Indonesia adalah negara berpenduduk terbesar keempat didunia dan terkenal dengan kesuburan tanahnya.¹

Pada dasarnya tanah merupakan kebutuhan mutlak serta merupakan tempat berkelangsungan hidup manusia diatas muka bumi ini, Indonesia merupakan negara Agraris, yang sebagian besar masyarakatnya menggantungkan hidupnya pada bidang pertanian, sehingga tanah memegang peranan sangat penting bagi kehidupan manusia, yang berfungsi sebagai sumber daya produksi maupun sebagai wadah untuk memenuhi kebutuhannya, seperti halnya mendirikan rumah, gedung perkantoran, lahan pertanian, perkebunan, perindustrian, pembangunan jalan, jembatan, prasarana rekreasi, pendidikan, instansi pemerintah dan lain sebagainya.²

¹ Insiklopedia bebas, *Luas Wilayah Indonesia* , diakses dari <http://id.m.wikipedia.org> > wiki > pada tanggal 28 januari 2019 pukul 5.43

² Efendi, Perangin, *Hukum Agraria di Indonesia*, (Jakarta, Raja Grafindo Persada, 1994),

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

Dengan demikian tanah memegang peranan yang sangat strategis dalam berbagai sektor kehidupan manusia, Seperti dalam aspek ekonomi, politik dan hukum, ketiga aspek tersebut merupakan isu sentral yang saling berkaitan sebagai satu kesatuan yang terintegrasi dalam pengambilan proses kebijakan hukum pertanahan yang dilakukan oleh pemerintah dan juga untuk menjamin kepastian hukum Sebagai mana yang kita ketahui bahwasanya tujuan hukum sendiri adalah untuk menciptakan: 1. Keadilan, 2. Kepastian Hukum, 3. Kemanfaatan.³

Maka didalam Undang-Undang Dasar 1945 pasal 33 ayat (3) Telah ditentukan bahwa "Bumi, Air, Ruang Angkasa, dan kekayaan alam lainnya dipergunakan sebesar-besarnya untuk kemakmuran". Sebagai tindak lanjut dari pasal 33 Ayat 3 Undang-Undang Dasar 1945 Tersebut pada tanggal 14 september 1960 diundangkan Undang-Undang Nomor 5 tahun 1960 Tentang peraturan dasar pokok Agraria atau disebut dengan singkatan UUPA.⁴

Lahirnya Undang-Undang Pokok Agraria Nomor 5 Tahun 1960 bertujuan untuk:⁵

- 1) Meletakkan dasar-dasar bagi penyusunan hukum Agraria nasional yang merupakan alat untuk membawakan kemakmuran, kebahagiaan dan keadilan bagi Negara dan juga Rakyat. Terutama Rakyat tani dalam rangka masyarakat yang adil dan makmur.

³ Lysa Anggraini, *Pengantar Ilmu Hukum*, (Pekan Baru, Suska Press, 2014) h. 22-24

⁴ Bambang Eko supriyadi, *Hukum Agraria Kehutanan*, (Jakarta, PT Raja Grafindo Persada), 2013 h.7

⁵ Undang-Undang pokok Agraria no. 5 tahun 1960.

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

- 2) Meletakkan dasar-dasar untuk mengadakan kesatuan dan kesederhanaan hukum pertanahan.
- 3) Meletakkan dasar-dasar untuk memberikan kepastian hukum mengenai hak-hak atas tanah bagi rakyat seluruhnya.

Tanah yang merupakan kekayaan nasional, dalam wilayah Negara Kesatuan Republik Indonesia yang kemerdekaannya diperjuangkan oleh seluruh rakyat Indonesia mestilah menjadi modal utama dalam membangun Bangsa Indonesia sebagai Bangsa Indonesia yang bermartabat. Sebagai mana semangat Bangsa Indonesia yang mampu melepaskan diri dari penjajahan kolonialisme Belanda. Pada masa itu Pra Kemerdekaan Republik Indonesia Pengaturan disektor Agraria telah berlangsung disetiap daerah dengan pola yang disesuaikan dengan corak ekonomi, Politik, sosial, kebudayaan daerah. Dapat dikatakan hampir setiap semua kegiatan hidup manusia baik secara langsung dan tidak langsung selalu memerlukan tanah. Pada saat manusia meninggal dunia masih memerlukan tanah untuk penguburannya begitu pentingnya tanah bagi kehidupan manusia, maka setiap orang akan selalu berusaha memiliki dan menguasainya.⁶

Dengan adanya hal tersebut maka tak jarang akan menimbulkan sengketa tanah didalam masyarakat. Sengketa tersebut timbul akibat adanya perselisihan antara beberapa pihak yang dirugikan di atas lahan yang sedang bersengketa tersebut, timbulnya sengketa hukum yang bermula dari pengaduan suatu pihak (orang/badan) yang berisikan keberatan keberatan

⁶ Ali Chomzah, *Hukum Pertanahan*, Prestasi Pustaka, Jakarta, 2003, h. 21

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

dan tuntutan-tuntutan hak atas tanah, prioritas, maupun kepemilikan dengan harapan dapat memperoleh penyelesaian secara administrasi sesuai dengan ketentuan-ketentuan yang berlaku.

Tanah dalam bahasa yunani adalah *pedon*, dan dalam bahasa latinnya adalah *solum* adalah bagian kerak bumi yang tersusun dari mineral dan bahan organik, tanah sangat vital peranannya bagi kehidupan di bumi karena tanah mendukung kehidupan tumbuhan dengan menyediakan hara dan air sekaligus sebagai penopang akar. Dapat didefinisikan menurut ilmu pastinya adalah kumpulan tubuh alam yang menduduki sebagian besar planet bumi yang mampu menumbuhkan berbagai tanaman dan sebagai tempat makhluk hidup lainnya untuk melangsungkan kehidupan.⁷

Sengketa tanah merupakan perebutan hak atas kepemilikan tanah yang jelas maupun kepemilikan tanah yang tidak jelas. Sengketa tanah banyak terjadi akibat adanya benturan kepentingan antara siapa dengan siapa, sadar akan pentingnya tanah untuk tempat tinggal atau kepentingan lainnya menyebabkan tanah yang tidak jelas kepemilikannya diperebutkan bahkan ada yang sudah jelas kepemilikannya masih ada juga di perebutkan, hal ini terjadi karena masyarakat sadar akan kepentingan haknya selain itu harga tanah yang semakin meningkat.⁸

Timbulnya sengketa hukum yang bermula dari pengaduan sesuatu pihak (orang atau badan) yang berisi keberatan-keberatan dan tuntutan hak

⁷Helmy Suhendar, "makalah tentang tanah", diakses dari <http://helmysuhendar.blogspot.com/makalah-tanah-struktur-jenis.html/>, pada 28 januari 2019 pukul 5.13.

⁸Urip santoso, *Hukum Agraria dan hak-hak atas Tanah*, (jakarta: Prenada media, 2005), h. 153

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

atas tanah, baik terhadap status tanah, prioritas, maupun kepemilikannya dengan harapan dapat memperoleh penyelesaian secara administrasi sesuai dengan ketentuan yang berlaku, peraturan yang berlaku tentang kasus pertanahan akan timbul karena adanya klaim/ pengaduan/ keberatan dari masyarakat (perorangan atau badan hukum) yang berisi kebenaran atau tuntutan terhadap suatu keputusan Tata Usaha Negara di bidang pertanahan di lingkungan badan pertanahan nasional, serta keputusan pejabat tersebut dirasakan merugikan hak-hak mereka atas suatu bidang tanah tersebut. Dengan adanya klaim tersebut mereka ingin mendapatkan penyelesaian secara administrasi dengan apa yang disebut koreksi serta merta dari pejabat yang berwenang untuk itu.⁹

Badan Pertanahan Nasional (disingkat BPN) adalah lembaga pemerintah nonkementerian di Indonesia yang mempunyai tugas pemerintah dibidang pertanahan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan. BPN dahulu disebut dengan kantor Agraria, BPN diatur melalui Peraturan Presiden Nomor 20 Tahun 2015. Pada masa pemerintahan Presiden Joko Widodo fungsi dan tugas dari organisasi Badan Pertanahan Nasional dan Direktorat Jendral Tata Ruang Kementerian yang bernama Kementerian Agraria dan Tata Ruang. Atas perubahan sejak 27 Oktober

⁹ Ali Achmad c, *Hukum Agraria (pertanahan Indonesia)*, (jakarta, Pustaka Media, .2004). h. 263

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

2014 Jabatan Kepala BPN dijabat oleh Menteri Agraria Dan Tata Ruang Yaitu Ferry Mursyidan Baldan.¹⁰

Dalam melaksanakan tugas, Badan Pertanahan Nasional menyelenggarakan Fungsi:

- 1) Penyusunan dan penetapan kebijakan dibidang pertanahan;
- 2) Perumusan dan pelaksanaan kebijakan di bidang survei, pengukuran, dan pemetaan;
- 3) Perumusan dan pelaksanaan kebijakan dibidang pengaturan, penataan dan pengendalian kebijakan pertanahan;
- 4) Perumusan dan pelaksanaan kebijakan dibidang pengaturan, penataan dan pengendalian kebijakan dibidang pengaturan, penataan dan pengendalian kebijakan pertanahan;
- 5) Perumusan dan pelaksanaan kebijakan di bidang pengadaan tanah;
- 6) Perumusan dan pelaksanaan kebijakan di bidang pengendalian dan penanganan sengketa dan perkara pertanahan;
- 7) Pengawasan atas pelaksanaan tugas dilingkungan Badan Pertanahan Nasional (BPN);
- 8) Pelaksanaan koordinasi tugas, pembiaian dan pemberi dukungan administrasi kepada seluruh unit organisasi dilingkungan Badan Pertanahan Nasional (BPN);

¹⁰Republik Indonesia. *Undang-Undang no. 20 tahun 2015 tentang Badan Pertanahan Nasional*”, diakses dari http://id.m.wikipedia.org/wiki-Badan_Pertanahan-Nasional, pada tanggal 26 oktober 2018

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

- 9) Pelaksanaan pengolaan data informasi lahan pertanian pangan berkelanjutan dan informasi di bidang pertanahan;
- 10) Pelaksanaan penelitian dan pengembangan di bidang pertanahan; dan
- 11) Pelaksanaan pengembangan sumber daya manusia di bidang pertanahan.¹¹

Untuk menyelenggarakan tugas dan fungsi Badan Pertanahan Nasional (BPN) di daerah, di bentuk kantor Wilayah Badan Pertanahan Nasional (BPN) di provinsi dan kantor Pertanahan di kabupaten/kota. Kantor pertanahan dapat di bentuk lebih dari 1 (satu) Kantor Pertanahan di tiap Kabupaten/kota. Dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud, Badan Pertanahan Nasional menyelenggarakan Fungsi:

1. Membangun kepercayaan masyarakat pada Badan Pertanahan Nasional.
2. Meningkatkan pelayanan dan pelaksanaan pendaftaran, serta sertifikasi tanah secara menyeluruh di seluruh Indonesia.
3. Memastikan penguatan hak-hak rakyat atas tanah (land tenure ship).
4. Menyelesaikan persoalan pertanahan di daerah-daerah korban bencana alam dan daerah-daerah konflik.
5. Menangani dan menyelesaikan perkara, masalah, sengketa, dan konflik pertanahan di seluruh indonesia secara sistematis.

¹¹ *Ibid.*

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

6. Membangun sistem informasi Pertanahan Nasional (SIMTANAS), dan sistem Pengamanan dokumen.
7. Menangani masalah KKN serta meningkatkan partisipasi masyarakat dan pemberdayaan masyarakat.
8. Membangun data base kepemilikan dan penguasaan tanah skala besar.
9. Melaksanakan secara konsisten semua peraturan perundang-undangan pertanahan yang telah ditetapkan.
10. Menata Kelembagaan Badan Pertanahan Nasional.
11. Mengembangkan dan memperbaiki politik, hukum dan kebijakan pertanahan.¹²

Bawan merupakan salah satu desa yang berada di Kecamatan Sultan Daulat, kota Subulussalam, Provinsi Aceh, Indonesia. Desa ini merupakan salah satu dari 17 desa dan kelurahan yang berada di Kecamatan Sultan Daulat. Desa ini yang sebagian besar penduduknya bersuku Pak-Pak Boang dan Singkil dan bermata pencaharian Petani. Pada saat terjadinya konflik antara Gerakan Aceh Merdeka (GAM) dan Tentara Nasional Indonesia (TNI) pada tahun 2000 di Aceh. Yang menyebabkan masyarakat pindah dari daerah tersebut untuk menyelamatkan diri dari konflik, bahkan pemerintah dan aparat setempat juga memberi himbuan dan peringatan kepada masyarakat yang masih berada didesa Bawan untuk segera pindah dan meninggalkan desa tersebut, dengan adanya himbauan dan peringatan maka

¹² *Ibid.*

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

desa Bawan yang ditempati kurang lebih 72 kepala keluarga pindah dari daerah rawan terjadinya konflik.

Kepala desa Pasir Belo beserta seluruh masyarakat desa Pasir Belo yang saat ini tinggal di daerah tersebut telah mengambil alih serta menjualkan lahan yang berada di lokasi desa Bawan tersebut kepada PT. Indo Sawit Perkasa (ISP). Sedangkan lahan yang berada di desa tersebut adalah lahan yang ditinggalkan oleh masyarakat sebelumnya akibat terjadinya konflik yang saat itu terjadi pada tahun 2000 hingga 2005. Pada saat PT. Indo Sawit Perkasa (ISP) mulai bekerja untuk pembersihan lahan.

Maka masyarakat yang merasa masih memiliki hak atas lahan di daerah tersebut tetap mempertahankan lahan miliknya dan memasang tapal batas di atas lahan tersebut, sebelum adanya penjelasan dan penyelesaian maka masyarakat meminta kepada pihak PT. Indo Sawit Perkasa (ISP) untuk menghentikan semua aktivitasnya yang berada di lahan tersebut. Akan tetapi dari pihak PT. Indo Sawit Perkasa (ISP) tidak mengindahkan dan mendengarkan Perkataan dari masyarakat dan tetap memulai aktivitasnya. Masyarakat yang saat itu tidak dapat menahan dan mengontrol emosinya terjadilah pemukulan dan pembakaran alat berat yang dilakukan oleh masyarakat.

Dewan Perwakilan Rakyat Kabupaten/kota (DPRK) sebagai penengah dan mendamaikan masyarakat yang bersengketa dan DPRK juga turun langsung kelokasi untuk melihat bukti-bukti atas kepemilikan lahan seperti pohon jengkol, pohon kelapa, pohon kelapa sawit dan bukti surat ijin garap

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

antara masyarakat dan kepala desa sebelumnya yang berada di desa Bawan tersebut dan membenarkan bahwa lahan tersebut adalah lahan milik masyarakat sebelumnya, lahan yang ditinggalkan akibat terjadinya konflik. Maka disini diharapkan peran dari Badan Pertanahan Nasional kota Subulussalam untuk mengatasi dan menyelesaikan masalah sengketa terhadap lahan milik masyarakat.

Berdasarkan latar belakang yang penulis paparkan, maka penulis tertarik untuk melakukan penelitian ini yang berjudul **“KEWENANGAN BADAN PERTANAHAN NASIONAL KOTA SUBULUSSALAM DALAM MENANGANI KASUS PERTANAHAN AKIBAT KONFLIK MENURUT PERATURAN PRESIDEN NOMOR 20 TAHUN 2015 TENTANG BADAN PERTANAHAN NASIONAL.**

B. Batasan Masalah

Untuk menghindari kesalah pahaman dan timbulnya pengertian yang berbeda-beda terhadap pemahaman judul yang diajukan, serta untuk keseragaman dan kesatuan pengertian pada penelitian ini, maka penulis merasa perlu memberikan batasan terhadap judul diatas. Adapun batasan sehubungan dengan judul tersebut adalah mengenai kewenangan Badan Pertanahan Nasioanal kota Subulussalam dalam menangani kasus pertanahan akibat konflik menurut Peraturan Presiden Nomor 20 tahun 2015 tentang Badan Pertanahan Nasional. Studi kasus di desa Bawan Kecamatan Sultan Daulat

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

C. Rumusan Masalah

Berdasarkan latar belakang yang diuraikan diatas, maka penulis mencoba merumuskan permasalahan sebagai berikut :

1. Bagaimana Kewenangan Badan Pertanahan Nasional Kota Subulussalam dalam menangani konflik pertanahan yang terjadi di desa Bawan Kota Subulussalam?
2. Apa hambatan Badan Pertanahan Nasional Kota Subulussalam dalam menangani konflik pertanahan yang terjadi di desa Bawan Kota Subulussalam?

D. Tujuan dan Manfaat Penelitian**1. Tujuan Penelitian**

Berdasarkan rumusan masalah yang diatas, maka maksud dari tujuan penelitian ini adalah sebagai berikut :

- a) Untuk mengetahui kewenangan Badan pertanahan Nasional dalam menangani konflik pertanahan yang terjadi pada desa Bawan kota Subulussalam.
- b) Untuk mengetahui hambatan Badan Pertanahan Nasional dalam menangani konflik pertanahan yang terjadai pada desa Bawan kota Subulussalam.

2. Manfaat Penelitian

Adapun manfaat yang diharapkan penulisdari penilitianini adalah sebagai berikut:

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

1) Manfaat Teoritis.

- a) Merupakan salah satu sarana bagi penulis untuk mengumpulkan data sebagai bahan penyusunan Proposal Penelitian guna melengkapi persyaratan untuk pembuatan Skripsi di Jurusan Ilmu Hukum Fakultas Syari'ah dan Hukum Universitas Islam Negeri Sultan Syarif Kasim Riau.
- b) Untuk memberikan pemikiran dan sumbangsih dalam perkembangan ilmu pengetahuan pada umumnya dan ilmu hukum pada khususnya.
- c) Hasil penelitian ini diharapkan mampu menjadi refrensi Pembuatan karya ilmiah yang akan datang.

2) Manfaat Praktis

- a) Dengan penulisan Proposal ini diharapkan dapat meningkatkan dan mengembangkan kemampuan penulis dalam bidang hukum dan dapat menyelesaikan penulisan skripsi pada selanjutnya.
- b) Hasil dari penelitian yang akan penulis teliti diharapkan dapat membantu pihak pihak yang terkait dengan permasalahan yang akan diteliti nantinya.

E. Metode Penelitian

Metode penelitian merupakan salah satu cara atau jalan memperoleh kembali pemecahan terhadap segala permasalahan. Penelitian ialah suatu kegiatan pencarian, penyidikan, atau percobaan secara ilmiah dalam suatu bidang tertentu untuk mendapatkan fakta-fakta baru yang bertujuan untuk

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

mendapatkan pengertian baru dan meningkatkan ilmu dan teknologi. Berdasarkan paparan diatas, maka penulis menyusun metode penelitian sebagai berikut :

1. Jenis Penelitian

Berdasarkan beberapa uraian singkat yang telah penulis paparkan, maka jenis penelitian yang akan dilakukan oleh penulis adalah penelitian yuridis sosiologis, yaitu dengan cara melakukan survey langsung kelapangan untuk mengumpulkan data primer dan disertai dengan data sekunder yang didapat langsung dari responden melalui observasi, wawancara, dan kajian pustaka untuk dijadikan data atau informasi sebagai bahan dalam penulisan penelitian ini.¹³

2. Lokasi Penelitian .

Penelitian ini adalah penelitian lapangan yang berlokasi Desa Pasir Belo Kecamatan Sultan Daulat dan kantor Dinas Pertanahan Kota Subulussalam. Alasan penulis memilih lokasi ini karena lokasi tersebut sangat mudah di jangkau oleh penulis.

3. Populasi dan Sampel

Populasi merupakan sekumpulan objek yang hendak diteliti berdasarkan lokasi penelitian yang telah di tentukan sebelumnya. Sedangkan sampel merupkan sebagian dari populasi yang dapat

¹³ Amiruddin, *Pengantar metode Penelitian Hukum*, (Jakarta: PT Rajawali Persada,2003).

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

mewakili keseluruhan objek penelitian untuk mempermudah peneliti dalam menemukan penelitian.¹⁴

Adapun yang akan menjadi populasi dan sampel adalah sebagai berikut

TABEL POPULASI DAN SAMPEL

No	Jenis populasi	Populasi	Sampel
1	Badan Pertanahan Nasional	12	1
2	Masyarakat yang memiliki lahan	72	6
	Jumlah	84	7

4. Sumber Data

Data adalah segala keterangan yang disertai dengan bukti atau fakta yang dapat dirumuskan untuk menyusun perumusan, kesimpulan.

a) Data Primer

Data yang diperoleh langsung dari lapangan atau objeknya. Dalam penelitian ini sumber datanya adalah data yang diperoleh langsung dari responden, wawancara dan kajian pustaka yang berkenaan dengan yang diteliti. Adapun dalam hal ini peneliti mewawancarai pihak-pihak yang terkait.

¹⁴ Bambang Waluyo, *Penelitian Hukum Dalam Praktek*, (Jakarta: Sinar Grafika, 2002), h.

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

b) Data Sekunder

Data yang diperoleh dengan membaca buku-buku atau peraturan perundang-undangan yang erat kaitanya dengan masalah yang diteliti.¹⁵

5. Metode Pengumpulan Data

Untuk memperoleh data-data yang diperoleh, Metode pengumpulan data yang digunakan adalah:

1) Observasi

Untuk mendiskripsikan setting, kegiatan yang terjadi, orang yang terlibat didalam kegiatan, waktu kegiatan dan makna yang diberikan oleh para pelaku yang diamati tentang peristiwa yang bersangkutan yaitu penulis langsung turun ke lokasi penelitian untuk melihat langsung mengenai permasalahan yang akan diteliti.

2) Wawancara

Untuk memperoleh informasi tentang hal-hal yang tidak dapat diperoleh lewat pengamatan yaitu mengemukakan pertanyaan pertanyaan secara lisan mengenai masalah yang akan diteliti.

3) Dokumentasi

Yaitu data data yang akan diambil langsung dari desa Pasir Belo dan masarakat yang memiliki lahan yang dapat berupa Gambar, Photo, dan lain sebagainya yang mendukung penelitian yang akan diteliti.

¹⁵ Amiruddin, *Op Cit.* h.30

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

4) Studi Kepustakaan

Data kepustakaan yang diperoleh melalui penelitian kepustakaan yaitu mengkaji literatur-literatur yang tersedia yang berkaitan dan berkenaan dengan permasalahan yang akan diteliti.¹⁶

F. Metode Analisi Data

Dalam rencana penelitian ini yang akan penulis gunakan adalah analisa secara deskriptif kualitatif, karena sifat data yang dikumpulkan hanya sedikit, bersifat monografis atau berwujud kasus-kasus, yaitu setelah semua sumber data telah berhasil dikumpulkan nantinya, maka penulis akan menjelaskan secara rinci dan sistematis sehingga dapat tergambar secara utuh dan dapat dipahami secara jelas pada kesimpulan akhirnya.¹⁷

G. Sistematika Penulisan

Untuk memudahkan pembaca dan memahami isi dari rencana penelitian ini maka penulis menyusun sistematika penulisannya kedalam lima (5) bab dan dibagi bagi ke dalam sub - sub bagian sebagai berikut :

BAB I : PENDAHULUAN

Terdiri dari Latar Belakang Masalah, Batasan Masalah, Rumusan Masalah, Tujuan Penelitian, Mamfaat Penelitian, Metode Penelitian, dan Sistematika Penulisan.

¹⁶ Juliansyah Noor, *Metodologi Penelitian Skripsi, Tesis, Disertai Karya ilmiah*, (Jakarta: Kecana, 2011, Edisi ke-1, Cet Ke-1, h.138

¹⁷ Sugiyono, *Op Cit*, h.249

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

BAB II : TINJAUAN UMUM

Tinjauan Umum berisikan tentang gambaran Umum lokasi penelitian, yaitu gambaran umum Desa Bawan Kota Subulussalam dan Sejarah, kota Subulussalam.

BAB III : TINJAUAN TEORITIS

Bab Ini berisikan uraian teori, konsep, asas, Norma, doktrin yang relevan dengan masalah hukum yang di teliti baik dari buku, jurnal Ilmiah, Yuresprudensi maupun Perundang-undangan dan sumber data lainnya yang ada kaitannya dengan penelitian ini.

BAB IV : HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN

Dalam bab ini akan menjelaskan hasil penelitian tentang Kewenangan Badan Pertanahan Nasional kota Subulussalam dalam menangani konflik pertanahan menurut Peraturan Presiden nomor 20 tahun 2015 tentang Badan Pertanahan Nasional.

BAB V : PENUTUP

Pada bab ini penulis menguraikan kesimpulan dan Saran yang diambil berdasarkan uraian pada bab sebelumnya.¹⁸

DAFTAR PUSTAKA

LAMPIRAN

¹⁸Sunggono Bambang, *metodologi penelitan hukum* , (jakarta PT. Raja Grafindo Persada, 2003),h. 11

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

BAB II

GAMBARAN UMUM LOKASI PENELITIAN

A. Sejarah kota Subulussalam

Sejarah kota Subulussalam, merupakan salah satu pemerintahan kota yang masih relatif muda dan satu-satunya kota yang berada yang berada di wilayah Barat Provinsi Aceh. Kota Subulussalam terbentuk pada awal tahun 2007 yaitu 2 Januari 2007 dengan dikeluarkannya Undang-Undang Nomor 8 Tahun 2007. Wilayah Kota Subulussalam yang memiliki luas 1.391,00 km² dan memiliki regional yang berada di bagian perbatasan antara Provinsi Aceh dengan Provinsi Sumatra utara, dengan batas-batas wilayah sebagai Berikut:

1. Sebelah Utara berbatasan dengan Kecamatan Lawe Alas, Kabupaten Aceh Tenggara dan Kabupaten Dairi, Provinsi Sumatera Utara.
2. Sebelah Timur berbatasan dengan Kabupaten Dairi Dan Kabupaten Pakpak Barat, Provinsi Sumatera Utara.
3. Sebelah Selatan berbatsan dengan Kecamatan Singkohor dan Kecamatan Suro, Kabupaten Aceh Singkil.
4. Sebelah Barat berbatasan dengan Kecamatan Trumon dan Kecamatan Trumon Timur, Kabupaten Aceh Selatan.

Kota Subulussaalam terletak pada posisi 02° 27' 30" - 03° 00' 00" dan 0 97° 45' 00" – 98° 10' 00" BT/ *East Latitude*. Pada saat terbentuknya Kota Subulussalam memiliki 5 kecamatan dengan 82 Desa dan 8 Kemukiman yaitu Kecamatan Simpang Kiri yang terdiri 17 Desa dan 2 kemukiman,

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

Kecamatan Penanggalan yang terdiri dari 13 desa dan 1 kemukiman, Kecamatan Rundeng yang terdiri dari 23 desa dan 2 kemukiman, Kecamatan Sultan Daulat yang terdiri dari 19 desa dan 2 kemukiman serta Kecamatan Longkip dengan 10 desa dan 1 Kemukiman.¹⁹

Singkatnya tentang Desa Bawan yang berada di Kecamatan Sultan Daulat Kota Subulussalam yang berkode pos 24782, Desa ini memiliki jumlah penduduk yang sebagian besarnya bersuku pak-pak boang yang bermata pencaharian Petani, Hasil pertanian utama di desa ini adalah Sawit, jagung, kakao, kelapa, dan lain-lain.²⁰

B. Kota Subulussalam

“SUBULUSSALAM SEJAHTERA BERKUALITAS DAN ISLAMI”

Diterjemahkan sebagai berikut:

VISI

- 1) Kota Subulussalam menjadi kota yang sejahtera, dalam hal ini terkandung cita-cita untuk mensejahterakan masyarakat Kota Subulussalam melalui program-program pemberdayaan masyarakat dan peningkatan pemenuhan pelayanan infrastruktur masyarakat terutama di pedesaan sehingga masyarakat yang berada dalam lingkungan kota Subulussalam dapat terjamin dalam memenuhi kebutuhan hidupnya.
- 2) Kota Subulussalam menjadi daerah yang berkualitas, dalam hal ini terkandung cita-cita membangun masyarakat Kota Subulussalam yang sehat dan cerdas. Visi ini akan memuat program-program peningkatan

¹⁹https://id.m.wikipedia.org/wiki/kota_Subulussalam/, pada tanggal 8 Agustus 2019 pukul 20,17

²⁰ *Ibid*,

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

kualitas dan mutu pendidikan baik Suprastruktur maupun Infrastruktur dan membebaskan biaya pendidikan bagi masyarakat kota Subulussalam serta peningkatan pelayanan kesehatan masyarakat yang bermutu dan gratis.

- 3) Kota Subulussalam menjadi kota yang islami, dalam visi ini terkandung cita-cita dan keinginan, mewujudkan masyarakat Kota Subulussalam yang Islami dengan menjalankan Syari'at Islam secara khaffah, untuk mencapai keinginan tersebut akan dikembangkan pendidikan keIslaman baik formal maupun non formal serta menumbuhkembangkan kegiatan-kegiatan sosial kemasyarakatan yang bernuansa islami dalam kehidupan masyarakat.

MISI

Dalam Mewujudkan visi Kepala Daerah tersebut ditempuh melalui 7 (tujuh) misi Pembangunan kota Subulussalam Sebagai Berikut:

- a) Mewujudkan Peningkatan pembangunan serta penyediaan sarana dan prasana pendidikan yang memadai dan penyediaan tenaga pendidik yang berkualitas. Hal ini bertujuan mewujudkan upaya pemerintah Kota Subulussalam untuk meningkatkan kualitas pendidikan melalui pembangunan sarana dan prasarana pendidikan yang digunakan sebagai tempat belajar dan mengajar baik peningkatan Pembangunan ruang kelas baru maupun pembangunan sekolah baru serta memenuhi peralatan yang menunjang kegiatan belajar agar terwujudnya kenyamanan dalam proses belajar dan mengajar yang terjangkau,

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

merata, relevan, dan setara bagi setiap masyarakat dalam memperoleh pendidikan tanpa memandang status sosial, suku, etnis, dan agama.

- b) Mewujudkan pelayanan kesehatan yang murah dan gratis dengan didukung ketersediaan sarana dan prasarana kesehatan yang baik serta pelayanan yang berkualitas. Didalam upaya peningkatan pelayanan kesehatan yang berkualitas maka akan diupayakan untuk melengkapi sarana dan fasilitas alat-alat kesehatan, menambah dokter spesialis dan meningkatkan kemampuan tenaga kesehatan untuk memiliki kompetensi yang baik.
- c) Mewujudkan serta meningkatkan pembangunan infrastruktur daerah dalam rangka memenuhi pelayanan dasar masyarakat ke arah peningkatan kualitas sumber daya manusia.
- d) Mewujudkan program peningkatan ekonomi kerakyatan dengan berbasis pemanfaatan potensi daerah melalui komoditi unggulan yang memiliki nilai prospek pasar yang baik. Disamping itu akan dilakukan upaya untuk mengembangkan struktur perekonomian daerah dengan menggali potensi dan produk unggulan hasil kreatifitas daerah yang mampu berdaya saing melalui pengembangan kewirausahaan terutama usaha kecil dan menengah, sehingga dapat menciptakan lapangan baru.
- e) Mewujudkan kemandirian desa melalui program pembangunan desa secara terpadu. Misi ini merupakan upaya yang dilakukan pemerintah kota Subulussalam untuk mewujudkan kemandirian desa yang maju

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

dengan prioritas meningkatkan kapasitas lembaga dan aparatur dalam menyelenggarakan manajemen pemerintahan desa serta menjalankan fungsi seluruh kantor-kantor desa yang ada di wilayah kota subulussalam dengan memberikan pendelegasian urusan pemerintahan yang jelas kepada pemerintah desa agar pelaksanaa tugas berjalan pada koridor yang jelas dan tepat.

- f) Mewujudkan penataan manajemen pemerintahan daerah yang baik. Upaya peningkatan kinerja pelayanan publik melalui peningkatan kualitas kinerja lembaga pelayanan perizinan terpadu dan mengaktifkan penyelenggaraan posko pengaduan layanan publik. Upaya peningkatan kinerja keuangan daerah melalui peningkatan kualitas pelaksanaan anggaran kinerja dengan menggunakan teknologi informasi (*e-Goverment*) dan peningkatan penerimaan pendapatan asli daerah melalui pembentukan sektor adalan penerimaan PAD.
- g) Mewujudkan penetapan syariat Islam melalui penguatan kembali sistem sosial yang berbasis islami dalam kehidupan bermasyarakat serta meningkatkan kembali sarana rumah-rumah persulukan yang dibangun secara permanen dan bantuan sosial keagamaan. Misi ini merupakan upaya pemerintah Kota Subulussalam meningkatkan penerapan syariat Islam secara khaffah di lingkungan kota Subulussalam melalui sarana dan prasarana tempat beribadah, meningkatkan kualitas pesantren, membentuk qanun tentang hukum islam dengan melibatkan peran ulama dan para tokoh masyarakat.

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

Menanamkan nilai-nilai islam dan menumbuh kembangkan Akhlakul karimah bagi generasi muda melalui pendidikan keagamaan.²¹

C. Aceh.

Keistimewaan daerah Aceh merupakan pengakuan dari bangsa Indonesia yang diberikan kepada Aceh karena perjuangan dan nilai-nilai hakiki masyarakat yang tetap dipelihara secara turun-temurun sebagai landasan spiritual, moral dan kemanusiaan. Keistimewaan bagi Aceh adalah kewenangan khusus untuk menyelenggarakan kehidupan beragama, adat, pendidikan dan peran ulama dalam penetapan kebijakan pemerintahan daerah.

Dalam hal ini Presiden Republik Indonesia mengeluarkan Peraturan khusus untuk wilayah Aceh dalam hal mengenai pertanahan seperti didalam Peraturan Presiden Nomor 23 Tahun 2015 mengenai peralihan Badan Pertanahan Nasional Aceh menjadi dinas Pertanahan Aceh.

D. Dinas Pertanahan kota Subulussalam

Kantor Dinas Pertanahan kota Subulussalam yang beralamat di jalan Teungku umar, desa Lae Oram, Kecamatan simpang Kiri, Kota Subulussalam, Aceh 24782 yang meliputi daerah kerja dikota Subulussalam dengan lima (5) kecamatan yakni;

- 1) Kecamatan Simpang Kanan.
- 2) Kecamatan Simpang Kiri.
- 3) Kecamatan Penanggalan.
- 4) Kecamatan Sultan Daulat.

²¹*Ibid,*

Gambar ii.1

[illegible]

State Islamic University of Sultan Syarif Kasim Riau

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dianggap mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dianggap mengemukakan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.



Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

BAB III

TINJAUAN TEORI

A. Badan Pertanahan Nasional

Badan Pertanahan Nasional adalah lembaga nonkementrian di Indonesia yang mempunyai tugas melaksanakan tugas pemerintahan di bidang pertanahan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan. BPN dahulu dikenal dengan sebutan Kantor Agraria. Pada masa Pemerintahan Presiden Joko Widodo fungsi dan tugas dari organisasi Badan Pertanahan Nasional dan Direktorat Jenderal Tata Ruang, Kementerian Pekerjaan Umum, atas perubahan ini sejak 27 Juli 2016 dijabat oleh Menteri Agraria dan Tata Ruang yaitu oleh Sofyan Djalil.²²

Pada era 1960 sejak berlakunya Undang-Undang Pokok Agraria (UUPA), Badan Pertanahan mengalami beberapa kali pergantian penguasaan dalam hal ini kelembagaan. Tentunya masalah ini berpengaruh pada pengabilan kebijakan. Ketika dalam naungan Kementerian Agraria sebuah kebijakan diproses dan di tindaklanjuti dari struktur pimpinan pusat sampai pada tingkat kanton, namun ketika dalam naungan departemen dalam Negeri hanya melalui Dirjen Agraria sampai ke tingkat Kanton. Disamping itu secara kelembagaan badan pertanahan mengalami perubahan struktur kelembagaan yang rentan waktunya.²³

²² Arie Sukanti, *Kewenangan Pemerintahan di Bidang Pertanahan*, PT Raja Grafindo Persada, Jakarta, 2008, h. 15

²³ Bambang Eko Supriyadi, *Hukum Agraria Kehutanan*, Pt Raja Grafindo Persada, Jakarta, h. 38

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:

- a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
- b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.

2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

B. Sejarah Badan Pertanahan Nasional

1. 1960- 1970

1960

Pada awal berlakunya UUPA, Semua bentuk Peraturan tentang pertanahan termasuk peraturan pemerintah masih dikeluarkan oleh Presiden dan menteri kehakiman. Kebijakan itu ditempuh oleh Pemerintah karena pada saat itu Indonesia masih mengalami masa transisi.

1965

Pada tahun 1965 Agraria dipisah dan dijadikan sebagai lembaga yang terpisah dari naungan menteri pertanian dan pada saat itu menteri agraria dipimpin oleh R. Hermanses. S.H.

1968

Pada tahun 1968 secara kelembagaan mengalami perubahan. Pada saat itu dimasukkan kedalam bagian departemen dalam negeri dengan nama Direktorat Jendral Agraria.²⁴

C. Kebijakan Pertanahan di Indonesia

Kebijakan pertanahan di Indonesia seringkali dipertanyakan oleh semua orang di negeri ini. Banyak pendapat kritis yang dilontarkan menyatakan kebijakan pertanahan di Indonesia tidak komprehensif, walaupun sudah jelas tertuang dalam konstitusi negara bahwa pengolahan sumber daya alam, termasuk tanah untuk sebenar-benarnya untuk

²⁴Arie sukanti, *Op.Cit.*, 21.

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

kemakmuran rakyat. Kebijakan pertanahan yang dirumuskan dalam pasal 3 ayat (3) UUD 1945 didasarkan pada konsepsi bahwa semua tanah adalah tanah bangsa Indonesia sebagai karunia Tuhan Yang Maha Esa, yang penguasaannya ditugaskan pada negara untuk digunakan sebesar-besarnya terhadap kemakmuran rakyat Indonesia. Hak menguasai oleh negara pada intinya dirumuskan pada pasal 2 UUPA, yang memberikan kewenangannya untuk mengatur dan menetapkan sebagai segi penguasaan tanah yang sejak semula menurut sifatnya selalu dianggap sebagai tugas pemerintah pusat. Bidang pertanahan sebagai salah satu bidang pemerintahan yang wajib dilaksanakan oleh kabupaten/kota dalam Pasal 11 Undang-Undang Nomor 22 tahun 1999 Tentang Pemerintahan Daerah. Tidak harus dicerna bahwa wewenang bidang tersebut berada di kabupaten/kota. Wewenang yang berada Kabupaten/Kota mengenai pertanahan yang bersipat, dan tidak bersifat nasional.²⁵

Karena dalam pemberian otonomi tersebut berada dalam bingkai Negara kesatuan, kebebasan mengatur dan mengurus bidang pertanahan yang dasar dan pokok-pokok ketentuan hukum pertanahan yang berlaku nasional sebagai yang dinyatakan dalam kata-kata “Sesuai dengan Peraturan Perundang-Undangan”. Sehubungan dengan itu, otonomi jelas tidak diartikan sebagai Penyerahan pengaturan dan pengurusan segala segi masalah pertanahan sepenuhnya pada kabupaten dan kota masing-masing, tetapi tetap kewenangan-kewenangan pengaturan hal-hal yang bersifat

²⁵ Supriadi, Hukum Agraria, Jakarta, Sinar grafika, 2012 h. 84

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

pokok dan umum. Serta pembinaan pemerintah pusat terhadap pelaksanaan kewenangan otonomi tersebut oleh pemerintah daerah masing-masing. Dengan demikian, kendati daerah akan memang dan harus memperhatikan kepentingan dan aspirasi masyarakatnya yang beragam, tetapi akan menjamin keserasian yang bersifat nasional.

Untuk itu perlu suatu ketentuan perundang-undangan yang secara jelas mengatur kewenangan-kewenangan yang didelegasikan kepada pemerintah daerah. Dari materi muatan yang terdapat dalam UUD 1945, TAP MPR Nomor IX/2001 tentang pembaruan Agraria dan pengelolaan Sumber Daya Alam, Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1960 Tentang peraturan dasar pokok-pokok Agraria, Undang-Undang Nomor 32 tahun 2004 Tentang pemerintahan Daerah, Peraturan Pemerintah Nomor 38 Tahun 2007 tentang pembagian urusan pemerintahan antar pemerintah, Pemerintah daerah provinsi dan pemerintah daerah kabupaten/Kota, kewenangan dari pusat meliputi hukum, kebijakan, pedoman mengenai pemberian hak-hak atas tanah, pendaftaran, *landreform*, dalam bentuk undang-undang maupun, Peraturan pemerintah maupun keputusan Presiden.²⁶

Pertimbangan kepengurusan pertanahan menjadi kewenangan pemerintah pusat antara lain:

1. Seluruh wilayah Indonesia adalah kesatuan Tanah air dari seluruh rakyat indonesia yang bersatu sebagai bangsa Indonesia (Pasal 1 ayat 1 UUPA).

²⁶ *Ibid*,

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

2. Seluruh bumi, air, dan ruang angkasa termasuk semua kekayaan alam yang terkandung didalamnya bangsa Indonesia.

D. Peran Badan Pertanahan Nasional Dalam Penyelesaian Konflik Pertanahan

Instansi pemerintahan yang diberikan kewenangan mengurus administrasi pertanahan adalah Badan Pertanahan Nasional (BPN) Republik Indonesia. Badan Pertanahan Nasional Republik Indonesia berubah menjadi kementerian Agraria dan Tata Ruang/Badan Pertanahan Nasional berdasarkan Peraturan Presiden Nomor 17 Tahun 2015 kemudian diubah menjadi tata ruang dan Peraturan Presiden Nomor 20 Tahun 2015 Tentang badan Pertanahan Nasional Yang ditetapkan Pada 21 Januari 2015.

Kementerian Agraria dan Tata Ruang memiliki fungsi:

- 1) Perumusan, penetapan, dan pelaksanaan kebijakan di bidang tata ruang, infrastruktur keagrarian, hubungan hukum keagrariaan, penataan keagrariaan/pertanahan, pengadaan tanah, pengendalian pemamfaat ruang dan penguasaan tanah, serta penanganan masalah agraria/pertanahan, pemanfaatan ruang, dan tanah.
- 2) Koordinasi pelaksanaan tugas, pembinaan dan pemberian dukungan administrasi kepada seluruh unsur organisasi dilingkungan kementerian Agraria dan Tata Ruang.
- 3) Pengelolaan barang milik/kekayaan negara menjadi tanggung jawab kementerian Agraria dan Tata Ruang.

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

- 4) Pelaksanaan bimbingan teknis dan supervisi atas pelaksanaan urusan kementerian Agraria dan Tata Ruang didaerah, dan
- 5) Pelaksanaan dukungan yang bersifat substansif kepada seluruh unsur organisasi dilingkungan kementerian Agraria dan Tata Ruang.

Badan Pertanahan Nasional memiliki Fungsi:

- 1) Penyusunan dan penetapan kebijakan dibidang pertanahan.
- 2) Perumusan dan pelaksanaan kebijakan dibidang survei, pengukuran, dan pemetaan.
- 3) Perumusan dan pelaksanaan kebijakan dibidang penetapan hak tanah, pendaftaran tanah, dan pemberdayaan masyarakat.
- 4) Perumusan dan pelaksanaan kebijakan dibidang pengaturan, penataan, dan pengendalian kebijakan pertanahan.
- 5) Perumusan dan pelaksanaan kebijakan dibidang pengadaan tanah.
- 6) Perumusan dan pelaksanaan kebijakan dibidang pengendalian dan penanganan sengketa dan perkara pertanahan.
- 7) Pengawasan atas pelaksanaan tugas dilingkungan BPN.
- 8) Pelaksanaan koordinasi tugas, pembinaan, dan pemberian dukungan administrasi kepada seluruh unit organisasi dilingkungan BPN.
- 9) Pelaksanaan pengelolaan data informasi lahan pertanian pangan dengan berkelanjutan dan informasi dibidang pertanahan.
- 10) Pelaksanaan penelitian dan pengembangan dibidang pertanahan.
- 11) Pelaksanaan pengembangan sumber daya manusia dibidang pertanahan.

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

- 12) Pelaksanaan dan pengelolaan data informasi lahan pertanian pangan berkelanjutan, dan informasi dibidang pertanahan.
- 13) Pelaksanaan pengkajian dan pengembangan hukum pertanahan.
- 14) Pelaksanaan peneliti dan pengembangan dibidang pertanahan.
- 15) Pelaksanaan pengembangan sumber daya manusia dibidang pertanahan.²⁷

1. Sengketa Tanah

Sengketa adalah segala sesuatu yang menyebabkan perbedaan pendapat, pertikaian atau perbantahan. Kata sengketa, perselisihan dan pertentangan didalam bahasa inggris sama dengan “*Conflict*” atau “*dispute*” Keduanya mengandung pengertian tentang adanya kepentingan diantara kedua belah pihak atau lebih, tetapi keduanya dapat dibedakan. Kosa kata “*conflict*” dalam bahasa Indonesia diserap menjadi konflik, sedangkan kosa kata “*dispute*”, diterjemahkan dengan artian sengketa. Konflik atau sengketa adalah sesuatu yang menyebabkan perbedaan pendapat antara dua belah pihak atau lebih yang berperkara di pengadilan.

Konflik atau sengketa terjadi juga karena adanya perbedaan persepsi yang merupakan penggambaran tentang lingkungan yang dilakukan secara sadar yang didasari pengetahuan yang dimiliki seseorang, lingkungan yang dimaksud adalah lingkungan fisik atau sosial. Sebuah konflik berkembang menjadi sengketa bila pihak yang

²⁷ Novy Purwanto, *Peran Badan Pertanahan Nasional Dalam Menyelesaikan Sengketa Pertanahan*,” Diakses dari <http://ojs.unud.ac.id/index.php/kerthasemaya/article/view/10493>, pada tanggal 3 september. 20019 pukul 10.27.

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

merasa dirugikan telah menyatakan rasa tidak puas atau keprihatinannya, baik secara langsung kepada pihak lain yang dianggap sebagai penyebab kerugian. Kasus-kasus yang menyangkut masalah sengketa pertanahan dapat dikatakan tidak pernah surut, bahkan memiliki kecenderungan untuk meningkat didalam kompleksitas permasalahannya maupun kuantitas seiring dinamika dibidang ekonomi, sosial, dan politik. Tanah sebagai sebagai hak semua orang rawan memunculkan konflik maupun sengketa. Sengketa kepemilikan tanah dapat diklasifikasikan menjadi dua: *pertama*, sengketa kepemilikan tanah melibatkan dua individu maupun lebih terkait keabsahan kepemilikan tanah. Sengketa kepemilikan tanah model ini lebih bersipat perisal dan horizontal. *Kedua*, sengketa yang melibatkan pemerintah sebagai kepala negara, Swasta sebagai pengelola yang mendapatkan izin dari pemerintah dan masyarakat sebagai integral dari negara, maka dari itu sengketa model ini lebih bersifat vertikal dan stuktural.

Tipologi kasus-kasus dibidang pertanahan secara garis besar dapat dipilih menjadi 5 kelompok yakni sebagai berikut:

1. Kasus-kasus yang berkenaan dengan penggarapan masyarakat atas tanah-tanah perkebunan, kehutanan, dan lain-lain.
2. Kasus-kasus yang berkenaan dengan peraturan *Ladreform*.
3. Kasus-kasus yang berkenaan dengan akses-akses penyediaan tanah untuk pembangunan.
4. Sengketa pertanahan yang berkaitan dengan masalah tanah.

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

5. Sengketa yang berkaitan dengan hak ulayat.

Sengketa tanah merupakan fenomena sosial yang kerap terjadi di negara berkembang. Hal ini dikarenakan belum optimalnya kebijakan pemerintahan dalam pengaturan kerangka strategis pada sektor agraria, baik secara pengelolaan, pemanfaatan, dan penguasaan tanah serta kekayaan yang terkandung didalamnya serta akses dari kebijakan politik Agraria sebagai akibat perubahan iklim politik. Penanganan sengketa kepemilikan tanah mestilah dilakukan dengan tepat sesuai dengan peraturan dan kelembagaan. Dampak dari sengketa dapat juga membuat penurunan tingkat kepercayaan masyarakat terhadap pemerintah yang berkenaan terhadap Tata Ruang.²⁸

2. Penyebab Timbulnya Sengketa

Terjadinya konflik pertanahan sebagai akibat dari dampak kegiatan industri yang berkaitan erat dengan bentuk hubungan sosial yang terjalin antara *stakeholder*, masyarakat, pemerintah, pihak pengusaha industri, serta instansi-instansi lain (termasuk lembaga swadaya masyarakat dan lembaga keagamaan) yang aktivitasnya terkait langsung dengan ketiganya, Secara umum sengketa tanah yang sering terjadi dapat dibagi menjadi lima kelompok, yaitu:

- a) Sengketa disebabkan oleh kebijakan pada masa orde baru.

Pemerintah orde baru menetapkan tanah sebagai sumber daya agraria tidak lagi menjadi sumber produksi atau tanah tidak lagi

²⁸ Ahmad Zaki, Skripsi: *Anilisa Sengketa Pertanahan di Desa Pasir Indah Kecamatan Kunto Darussalam Kabupaten Rokan Hulu* (Pekanbaru, UIN RIAU, 2016), h. 16.

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

menjadi kemakmuran rakyat, melainkan tanah sebagai aset pembangunan demi mengejar pertumbuhan ekonomi yang bahkan kebijakan itu sangat merugikan kepentingan rakyat. Kebijakan pemerintah orde baru dapat menimbulkan sengketa penguasaan sumber daya agraria antara pemilik sumber daya agraria dalam hal ini rakyat dengan para pemilik modal yang di fasilitasi oleh pemerintah.

- b) Tumpang tindih peraturan perundang-undangan tentang sumber daya agraria.

Undang-Undang Pokok Agraria (UUPA) Sebagai induk dari sumber daya agraria lainnya, namun dalam perjalanan waktu dibuatlah peraturan perundang-undangan yang berkaitan dengan sumber daya agraria yang tidak menepatkan UUPA sebagai Undang-Undang Induknya, bahkan justru menepatkan UUPA sejajar dengan Undang-Undang agraria lainnya sebagai Undang-Undang sektoral (Undang-Undang Kehutanan), Undang-Undang Petambangan, Minyak dan Gas bumi, Undang-Undang Lingkungan, dan Undang-Undang Tata Ruang, yang mengacu pada UUPA.

- c) Tumpang Tindih Penggunaan Tanah.

Tumpang tindih kegunaan tanah tergantung pada kebijakan pemerintah dalam pemanfaatan tanah yaitu pemanfaatan tanah yang tidak sesuai dengan rencana tata ruangnya, sebagai contoh pemberian izin oleh pemerintah daerah setempat untuk berdirinya sebuah pabrik

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

ditengah-tengah perumahan, berdirinya perumahan dikawasan industri.

- d) Yang Kualitas sumber daya manusia dari aparat pelaksana peraturan sumber daya agraria.

Dalam melaksanakan tugasnya, aparat pelaksanaan melakukan penyimpangan terhadap peraturan perundang-undangan yang berlaku menyebabkan timbulnya praktek korupsi, kolusi dan nepotisme (KKN). Aparat pelaksanaan lebih mementingkan kepemilikan para modal dari pada kepentingan kepemilikan tanah atau mengacuhkan kelestarian hidup.

- e) Berubahnya pola pikir masyarakat terhadap penguasaan tanah.

Terkait tanah sebagai aset pembangunan, maka muncul perubahan pola pikir masyarakat terhadap penguasaan tanah, yaitu tidak lagi menempatkan tanah sebagai sumber produksi, akan tetapi menepatkan tanah sebagai sarana investasi atau komoditas ekonomi.²⁹

3) Penyelesaian Sengketa.

Penyelesaian sengketa pada kondisi masyarakat yang masih sederhana, dimana hubungan kekerabatan dan kelompok masih kuat, maka pilihan institusi yang bersifat kerakyatan (*Folk Institutions*), karena institusi penyelesaian sengketa atau konflik yajng bersifat tradisional bermakna sebagai institusi penjaga keteraturan dan pengembalian

²⁹ *Ibid.*

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

keseimbangan magis dalam masyarakat. Sedangkan konflik-konflik atau sengketa-sengketa yang terjadi dalam masyarakat modern dimana relasi lebih bersifat individualistik dan berorientasi pada perekonomian pasar, cenderung diselesaikan melalui institusi penyelesaian sengketa yang mengacu pada hukum negara (*state institutions*) yang bersifat legalistik.

Penyelesaian konflik pertanahan dengan negosiasi dilakukan oleh para pihak yang bersengketa untuk mendapatkan kesepakatan bagi kedua pihak dengan jalan *win-win solution*, tidak ada masyarakat yang merasa dirugikan, penyelesaian sengketa pertanahan dengan cara musyawarah dan mufakat dilakukan oleh para pihak untuk menyelesaikan sengketanya dengan melibatkan keluarga para pihak yang disaksikan oleh para pemuka agama atau para pemuka masyarakat. Sedangkan penyelesaian sengketa dengan cara mediasi yang mana para pihak menunjuk pihak-pihak tertentu yang dihormati dan dihargai sebagai mediator (penengah) dalam penyelesaian tersebut.

Penyelesaian sengketa dapat digolongkan kedalam beberapa cara, yakni berdasarkan pihak-pihak yang menyelesaikan sengketa dapat dilakukan dengan cara sebagai berikut:

- 1) Mediasi, yaitu proses penyelesaian sengketa dimana pihak ketiga yang dimintakan bantuannya untuk membantu proses penyelesaian sengketa. Sifat pihak ketiga tersebut adalah pasif dan sama sekali tidak berhak atau berwenang untuk memberikan suatu masukan terlebih dahulu lagi untuk memutuskan perselisihan yang terjadi.

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

2) Konsiliasi, adalah suatu proses penyelesaian sengketa yang melibatkan pihak ketiga yang diikuti sertakan dalam menyelesaikan sengketa yaitu orang secara profesional sudah dapat dibuktikan keahliannya, konsiliator memiliki peran yang sangat penting oleh karena itu konsiliator berkewajiban menyampaikan pandangannya mengenai duduk persoalan yang dihadapi, bagaimana cara penyelesaiannya, apa keuntungan dan kerugian para pihak serta akibat-akibat hukumnya. Konsiliator tidak berhak membuat keputusan dalam sengketa untuk dan atas nama para pihak.

3) Arbitrase, adalah suatu bentuk penyelesaian sengketa yang melibatkan pengambilan keputusan oleh satu atau lebih hakim swasta yang disebut dengan arbiter, arbiter berperan sangat aktif sebagai mana halnya dengan seorang hakim. Dalam hal arbiter tunggal maupun majelis arbiter berkewajiban untuk memutuskan sengketa yang disampaikan kepadanya secara profesional. Arbiter harus profesional dalam hal ini.

Penyelesaian sengketa dalam kepemilikan tanah yang bersifat vertikal struktural harus dilakukan dengan komprehensif agar permasalahan agar permasalahan tersebut dapat diselesaikan dengan tuntas. Untuk itu penyelesaian sengketa pertanahan tersebut harus dilakukan sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku serta dengan kelembagaan yang terkait. Hal ini agar kebijakan dalam

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

penyelesaian sengketa kepemilikan tanah tersebut dapat mengatasi permasalahan serta kepentingan pihak yang bersengketa.³⁰

4) Hak- Hak Atas Tanah

Pada pasal 33 ayat (1) UUD 1945, dikatakan bahwa, bumi, air, dan ruang angkasa. Termasuk kekayaan alam yang terkandung didalamnya itu pada tingkatan tertinggi dikuasai oleh negara sebagai organisasi kekuasaan seluruh rakyat. Hak menguasai dari negara termaksud dalam UUPA (pasal 1 ayat 2) memberi wewenang kepada negara untuk mengatur dan menyelenggarakan peruntukan, penggunaan, persediaan, memelihara bumi, air, dan ruang angkasa tersebut.

- a) Menentukan dan mengatur hubungan-hubungan hukum antara orang-orang dengan bumi, air, dan ruang angkasa.
- b) Menentukan hubungan-hubungan hukum antara orang-orang dan perbuatan-perbuatan hukum yang mengenai bumi, air, dan ruang angkasa. Atas dasar hak menguasai dari negara sebagai yang dimaksud dalam pasal 2 ditentukan adanya macam- macam hak atas permukaan bumi, yang disebut tanah, yang dapat diberikan dan dipunyai oleh orang-orang lain serta badan-badan hukum UUPA, pasal 4 ayat 1. Pasal ini memberikan wewenang untuk mempergunakan tanah yang bersangkutan demikian pula tubuh bumi dan air serta ruang diatasnya.

³⁰ Susanti Adi Nungroho, *Penyelesaian Sengketa Arbitrase Dan Penerapan Hukumnya*, (Jakarta, Prenada Media Group, 2015), h. 73.

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

5) Jenis-jenis Atas Tanah

1. Hak milik.

Adalah hak yang paling kuat atas tanah, yang memberikan kewenangan kepada pemiliknya untuk memberikan kembali suatu hak lain diatas bidang tanah hak milik yang dimilikinya tersebut.

2. Hak Guna Usaha.

Hak guna usaha adalah untuk mengusahakan tanah yang dikuasai langsung oleh negara, guna perusahaan pertanian, perikanan atau pertambangan dengan jangka waktu 35 tahun dan dapat diperpanjang untuk jangka waktu paling lama 25 tahun. Sesudah jangka waktu dan perpanjangannya berakhir kepemegang hak dapat diberikan pembaharuan hak guna usaha diatas tanah yang sama. Diberikan paling sedikit luasnya 5 hektar harus dikelola dengan investasi modal yang layak dengan teknik perusahaan yang baik sesuai dengan perkembangan zaman, hak guna usaha dapat dipunyai warga Negara Indonesia, dan badan hukum yang didirikan berdasarkan hukum Indonesia dan berkedudukan di Indonesia. Tanah yang dapat diberikan dengan hak guna usaha adalah tanah negara.

Hak guna usaha terjadi karena penetapan pemerintahan. Hak guna usaha setiap peralihan, hapusnya dan pembenamaya dengan hak lain. harus didaftarkan dikantor pertanahan setempat. Pendaftaran dimaksud merupakan pembuktian yang kuat dan hak

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

guna usaha dapat dijadikan jaminan utang dengan dibebani hak tanggungan.

3. Hak Guna Bangunan.

Hak guna bangunan adalah hak untuk mendirikan dan mempunyai bangunan-bangunan atas tanah yang bukan miliknya sendiri, yang dapat berupa tanah negara, tanah bak pengelolaan, tanah hak milik orang lain dengan jangka waktu paling lama 30 tahun diperpanjang paling lama 20 tahun. Setelah berakhir jangka waktu dan perpanjangan dapat diberikan pembaharuan baru hak guna bangunan diatas tanah yang sama. Hak guna bangunan dapat beralih dan dialihkan kepada pihak lain.

Hak guna bangunan dapat dipunyai warga negara Indonesia dan badan hukum yang didirikan berdasarkan hukum Indonesia dan berkedudukan di Indonesia. Hak guna bangunan terjadi karena penetapan pemerintah. Hak guna bangunan setiap peralihan, hapusnya dan pembebanannya dengan hak lain. Harus didaftarkan dikantor pertanahan setempat, pendaftaran dimaksud merupakan pembuktian yang kuat. Hak guna bangunan dapat dijadikan jaminan hutang dengan dibebani hak tanggungan.

4. Hak Pakai.

Hak pakai adalah hak untuk menggunakan dan atau memungut hasil dari tanah yang dikuasai langsung oleh negara atau tanah milik orang lain, yang memberikan wewenang dan kewajiban

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

yang di tentukan dalam keputusan pemberiannya oleh pejabat yang berwenang memberikannya atau dalam perjanjian dengan pemilik tanahnya, yang bukan perjanjian sewa-menyewa atau perjanjian pengelolaan tanah segala sesuatu asal tidak bertentangan dengan jiwa dan ketentuan perundang-undangan, hak pakai dapat diberikan:

- a) Selama jangka waktu yang tertentu atau selama tanahnya dipergunaan untuk keperluan yang tertentu.
 - b) Dengan cuma-cuma, dengan pembayaran atau pemberian jasa berupa apapun.
 - c) Pemberian hak pakai tidak boleh diberikan syarat-syarat yang mengandung unsur-unsur pemasaran.
 - d) Yang mempunyai hak pakai adalah warga negara Indonesia, orang asing yang berkedudukan di negara Indonesia, badan hukum yang didirikan menurut hukum di Indonesia dan kedudukan di Indonesia, badan hukum asing yang mempunyai perwakilan di Indonesia.
- 6) Hak Sewa

Hak sewa adalah seseorang atau sesuatu badan hukum mempunyai hak sewa atas tanah, apabila ia berhak memepergunakan tanah milik orang lain untuk keperluan bangunan dengan membayar kepada pemiliknya sejumlah uang sebagai tanda sewa. Pembayaran uang sewa dapat dilakukan dengan beberapa tahapan:

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

- a) Satu kali pada tiap-tiap waktu tertentu.
- b) Sebelum atau sesudah tanahnya dipergunakan.
- c) Perjanjian sewa tanah yang dimaksud dalam pasal ini tidak boleh disertai syarat-syarat yang mengandung pemerasan.

Yang dapat memegang hak sewa adalah warga negara indonesia, orang asing yang berkedudukan di indonesia, badan hukum yang didirikan menurut hukum di indonesia dan berkedudukan di indonesia, badan hukum asing yang mempunyai perwakilan di indonesia.

7) Hak membuka tanah dan memungut hasil hutan.

Hak membuka tanah dan memungut hasil hutan hanya dapat dipunyai oleh warga negara Indonesia dan diatur dengan peraturan pemerintahan dengan mempergunakan hak memungut hasil hutan secara sah tidak dengan sendirinya diperoleh hak milik atas tanah itu.

Peralihan hak atas tanah dapat terjadi karena:

- a. Jual beli.
- b. Tukar Menukar.
- c. Penyertaan dalam modal.
- d. Hibah.
- e. Pewarisan.

6) Hapusnya Hak Atas Tanah

- a. Jangka waktu yang telah berakhir.

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

- b. Dibatalkan sebelum jangka waktunya berakhir karena suatu syarat yang tidak dipenuhi.
- c. Dilepaskan secara sukarela oleh pemegang haknya sebelum jangka waktunya berakhir.
- d. Dicabut untuk kepentingan umum.
- e. Ditelantarkan.
- f. Tanahnya musnah.
- g. Beralih kewarganegaraan asing (khusus hak milik) atau badan hukum asing (Khusus HGU dan HGB).³¹

E. Sejarah dan asal usul terjadinya konflik pertanahan di Indonesia.

Pembukaan tanah perkebunan pada masa Hindia Belanda selalu menimbulkan sengketa antara penguasa dan rakyat. Hal ini disebabkan tanah perkebunan baru berada dalam kawasan tanah yang dikuasai oleh rakyat dengan hak-hak adat telah melegetimasi Negara pemerintah untuk memiliki tanah-tanah yang kemungkinan besar berada dalam kawasan hak ulayat, rakyat pribumi kerap kali dituduh telah melanggar hak, yang sering kali dirumuskan dalam bentuk tuduhan memakai tanah tanpa izin atau secara liar. Terhadap hal-hal yang demikian, pemerintah Hindia Belanda mengeluarkan ketentuan *odonatine* tanggal 7 oktober 1937.

Menurut beberapa pakar penyebab terjadinya konflik di bidang pertanahan di Indonesia ialah keterbatasan kesedian tanah, Ketimpangan dalam struktur penguasaan tanah, ketiadaan persepsian yang sama antara

³¹ Supriadi, *Hukum Agraria*, Jakarta, Sinar Grafika, h. 64

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

sesama pengelolaan negara mengenai makna penguasaan tanah oleh negara, inkonsistensi, dan ketidaksinkronisasian antar undang-undang dengan kenyataan dilapangan seperti terjadinya manipulasi pada masa lalu yang mengakibatkan pada era reformasi sekarang ini muncul kembali gugatan dualisme kewenangan (pusat daerah) tentang urusan pertanian serta ketidakjelasan mengenai kedudukan hak ulayat, dan masyarakat hukum adat dalam system perundang-undangan agraria pada tahun 1930, pemerintah Belanda dibawah Gubernur van den bosch, yang menggunakan konsep tanam paksa.

Pada masa tanam paksa para pemilik dikenai pajak wajib mengalokasikan tanahnya untuk ditanami tanaman yang laku diekspor, seperti nila, kopi, tembakau, teh, tebu, hasilnya dengan harga yang sangat murah, dengan demikian pemerintah Hindia Belanda mendapatkan keuntungan yang sangat besar.

Kebijakan pemerintah kolonial selanjutnya berubah menjadi masa liberalisme, dimana konsep tanah bukan lagi milik negara tapi menjadi milik swasta. Para pemodal asing diperbolehkan mempunyai aset agrarian, dan rakyat sebagai penggarapnya ketika itu perkebunan yang menghasilkan tumbuhan yang berorientasikan ekspor yang memberiakan keuntungan luar biasa bagi para pemodal Belanda, sementara rakyat menderita dengan dipaksa menjadi tenaga kerja murah.

Ketika Belanda hengkang dan digantikan Jepang, pihak Jepang memaksa penduduk untuk menyerahkan padi yang dihasilkan oleh petani, rakyat juga didorong untuk mengelola tanah perkebunan yang ditinggalkan

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

pengusaha asing dan menanaminya lalu menyerahkan hasilnya kepihak Jepang. Maka rakyat menganggap telah memperoleh tanah mereka kembali yang dirampas Belanda. Pada masa terbentuknya VOC (*verenigde Oost Indische Compagnie*) didirikan sebagai badan perdagangan dengan maksud untuk mencegah atau menghindari persaingan antara pedagang Belanda yang mendapat monopoli dari Asia Selatan, yang membeli murah dan menjual mahal rempah-rempah sehingga memperoleh keuntungan yang sebesar-besarnya.

VOC mengadakan hukuman secara berat di daerah-daerah yang dikuasainya, dalam hal ini memperdulikan hak-hak tanah yang dipegang oleh rakyat dan raja-raja Indonesia. Beberapa kebijakan politik pertanian yang sangat menindas rakyat pribumi yang diterapkan oleh VOC antara lain:

- 1) *Contingenten*, yaitu pajak atas hasil tanah yang diserahkan kepada penguasa koloni (kompeni).
- 2) *Verpliche Levernatem*, yaitu suatu bentuk ketentuan yang diputuskan oleh kompeni dengan raja tentang kewajiban menyerahkan seluruh hasil panen dengan pembayaran yang harganya juga sudah ditetapkan dengan sepihak.

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

- 3) *Roerendiensten*, kebijakan ini dikenakan dengan nama kerja rodi, yang dibebankan kepada rakyat Indonesia yang mempunyai tanah pertanian.³²

PERIODE 2013- 2015

Pada 2 oktober 2013 terbit peraturan Presiden Nomor 63 Tahun 2013 tentang Badan Pertanahan Nasional sebagai berikut:

- a. Penyusunan dan kebijakan dibidang pertanahan.
- b. Pelaksanaan koordinasi kebijakan, rencana, program, dan kerja sama dibidang pertanahan.
- c. Pelaksanaan koordinasi tugas, pembangunan, dan pemberi dukungan administrasi kepada seluruh unit organisasi dilingkungan BPN RI.
- d. Perumusan dan pelaksanaan kebijakan dibidang penetapan hak-hak tanah, pendaftaran tanah, dan pemberdayaan masyarakat.
- e. Perumusan dan kebijakan dibidang penetapan hak tanah, pendaftaran tanah, dan pemberdayaan masyarakat.
- f. Perumusan dan pelaksanaan kebijakan dibidang pengaturan, penataan, dan pengendalian kebijakan pertanahan.
- g. Perumusan dan pelaksanaan kebijakan dibidang pengadaan tanah bagi pembangunan untuk kepentingan umum, dan penetapan hak tanah instansi.

³² Bambang Eko Supriyadi, *Hukum Agraria Kehutanan*, Jakarta, Pt. Raja Grafindo Persada, h. 9

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

- h. Perumusan dan pelaksanaan kebijakan dibidang pengkajian dan penanganan sengketa dan perkara pertanahan.
- i. Pengawasan dan pembinaan fungsional atas pelaksanaan tugas dibidang pertanahan.
- j. Pelaksanaan pengelolaan data informasi lahan pertanian pangan berkelanjutan dan informasi dibidang pertanahan.
- k. Pelaksanaan pengkajian dan pengembangan hukum pertanahan.
- l. Pelaksanaan penelitian dan pengembangan dibidang pertanahan.
- m. Pelaksanaan pembinaan, pendidikan, pelatihan, dan pengembangan sumber daya manusia dibidang pertanahan, dan.
- n. Penyelenggaraan dan pelaksanaan fungsi lain dibidang pertanahan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

PERIODE 2016-2013

Pada 11 April 2006 terbit Peraturan Presiden Nomor 10 Tahun 2006 tentang Badan Pertanahan Nasional yang menguatkan kelembagaan Badan Pertanahan Nasional, dimana tugas yang diemban BPN RI juga menjadi semakin luas, BPN RI bertanggung jawab langsung kepada Presiden, dan melaksanakan tugas pemerintahan dibidang pertanahan nasional, regional, dan sektoral, dengan fungsi;

- a. Perumusan kebijakan dibidang pertanahan.
- b. Perumusan kebijakan teknis dibidang pertanahan.
- c. Koordinasi kebijakan, perencanaan dan program dibidang pertanahan.

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

- d. Penyelenggaraan dan pelaksanaan survei, pengukuran dan pemetaan dibidang pertanahan.
- e. Pembinaan dan pelayanan administrasi umum dibidang pertanahan.
- f. Pelaksanaan pendaftaran tanah dalam rangka menjamin kepastian hukum.
- g. Pengaturan dan penetapan hak-hak atas tanah, pelaksanaan penatagunaan tanah, reformasi agraria, dan penataan di wilayah-wilayah khusus.
- h. Penyiapan administrasi atas tanah yang dikuasai dan/atau milik Negara/daerah bekerjasama dengan Departemen keuangan.
- i. Pengawasan dan pengendalian penguasaan pemilik tanah;

PERIODE 2000-2006

Pada periode ini BPN beberapa kali mengalami perubahan struktur organisasi. Keputusan Presiden Nomor 95 tahun 2000 tentang Badan Pertanahan Nasional mengubah struktur organisasi eselon satu di Badan Pertanahan Nasional. Namun yang lebih mendasar adalah keputusan presiden Nomor 10 Tahun 2001 tentang Pelaksanaan Otonomi Daerah dibidang Pertanahan. Disusul kemudian terbit keputusan Presiden Nomor 103 Tahun 2001 tentang kedudukan, tugas, fungsi, kewenangan, susunan organisasi, dan tata kerja lembaga pemerintahan non departemen, dan Keputusan Presiden Nomor 34 Tahun 2003 tentang kebijakan Nasional dibidang pertanahan memposisikan BPN sebagai lembaga yang menangani kebijakan nasional dibidang pertanahan.

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

PERIODE 1999-2000

Pada tahun 1999 terbit Keputusan Presiden Nomor 154 Tahun 1999 Tentang perubahan Keputusan Presiden Nomor 26 tahun 1988 Kepala Badan Pertanahan Nasional dirangkap oleh menteri dalam negeri Republik Indonesia Pelaksanaan pengelolaan pertanahan sehari-harinya dilaksanakan Wakil Kepala Badan Pertanahan Nasional.

PERIODE 1993-1998

Berdasarkan Keputusan Presiden Nomor 96 tahun 1993, Tugas kepala Badan Pertanahan Nasional yang dirangkap oleh Menteri Negara Agraria Kedua lembaga tersebut dipimpin oleh satu orang sebagai Menteri Agraria/ Kepala Badan Pertanahan Nasional dalam melaksanakan tugasnya, kantor Menteri Negara Agraria berkonsentrasi merumuskan kebijakan yang bersifat koordinasi, sedangkan Badan Pertanahan Nasional lebih berkonsentrasi pada hal-hal yang bersifat operasional.

Pada 1994 Menteri Negara Agraria/kepala Badan Pertanahan nasional Nomor 5 Tahun 1994, Tentang susunan Organisasi dan Tata kerja staf Kantor Menteri Negara Agraria.

Periode berdirinya BPN dan masa sesudahnya, 1988-1993

Tahun 1998 merupakan tonggak bersejarah karena saat itu terbit keputusan Presiden Nomor 26 Tahun 1998 tentang Badan Pertanahan Nasional. Sejalan dengan meningkatnya Pembangunan Nasional yang menjadi tema sentral proyek ekonomi-politik Orde Baru, Kebutuhan akan tanah juga makin meningkat, persoalan yang dihadapi Direktorat jendral

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

agraria bertambah berat dan rumit untuk mengatasi hal tersebut, Status Direktorat Jenderal Agraria ditingkatkan menjadi lembaga pemerintahan Non departemen dengan nama Badan Pertanahan Nasional Dengan lahirnya Keputusan Presiden Nomor 26 Tahun 1998 Tersebut badan Pertanahan Nasional bertanggung jawab langsung kepada Presiden.

1. Masa Kolonial Belanda dan Jepang

Sejak berlakunya *Agrarische Wet* tahun 1870, Pemerintah Kolonial Belanda mengeluarkan *Staatblad* 1823 Nomor 164 yang menyebutkan bahwa penyelenggaraan kadastral diserahkan kepada lembaga yang diberi nama *Kadasteral Dient* Perannya yang sangat strategis membuat pejabatnya diangkat dan diberhentikan langsung oleh Gubernur Jenderal. Ketika masa Penjajahan Belanda digantikan oleh Jepang pada tahun 1942, tidak diadakan perombakan besar atas peraturan tanah *Kadasteral Dient*, Misalnya masih dibawah departemen kehakiman, hanya namanya yang saja diganti menjadi Jawatan Pendaftaran Tanah dan namanya menjadi kantor Pendaftaran Tanah. Namun demikian, pada masa penjajahan Jepang dikeluarkan peraturan yang melarang pemindahan hak atas benda tetap/tanah (Osamu Sierei Nomor 2 Tahun 1942) Penguasaan tanah Partikelir juga dihapuskan oleh pemerintahan Dai Nippon.

2. Masa Kemerdekaan 1945 -1960

Pasca Proklamasi kemerdekaan, sesuai dengan semangat membentuk negara baru yang merdeka, Pemerintah Republik

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

Indonesia bertekad membenahi dan menyempurnakan pengelolaan pertanahan landasan hukum pertanahan yang masih menggunakan produk hukum warisan pemerintah belanda mulai diganti. Melalui Departemen dalam Negeri, Pemerintah mempersiapkan landasan hukum pertanahan yang sesuai dengan UUD 1945. Pada 1948 berdasarkan Penetapan Presiden Nomor 16 Tahun 1948, Pemerintah membentuk Panitia Agraria Yogyakarta tiga tahun kemudian, terbit keputusan Presiden Nomor 36 Tahun 1951, yang membentuk yang membentuk panitia Agraria Jakarta, sekaligus membubarkan panitia Agraria yogyakarta. Pembentukan kedua panitia Agraria itu sebagai upaya mempersiapkan lahirnya unifikasi hukum pertanahan yang sesuai dengan kepribadian Bangsa Indonesia.

Selanjutnya, lewat keputusan Presiden Nomor 55 tahun 1955, Pemerintah membentuk kementrian Agraria yang berdiri dan terpisah dari departemen dalam Negeri pada 1956, berdasarkan Keputusan Presiden Nomor 1 tahun 1956 dibentuk Panitia Negara Urusan Agraria Yogyakarta yang sekaligus membubarkan panitia Agraria jakarta Tugas panitia urusan agraria ini antara lain adalah mempersiapkan proses Penyusunan Undang-Undang Pokok Agraria (UUPA).

Pada 1 juni 1957, Panitia Negara Urusan Agraria selesai menyusun rancangan UUPA pada saat yang sama, berdasarkan Keputusan Presiden Nomor 190 Tahun 1957, jawatan pendaftaran

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

tanah yang semula berada di kementerian kehakiman dialihkan ke kementerian Agraria tahun 1958 berdasarkan keputusan RI Nomor 97 Tahun 1958, Rancangan Undang-Undang Agraria Nasional diajukan ke dewan Perwakilan Rakyat.

3. Lahirnya UUPA dan Masa Sesudahnya, 1960-1965

Titik tolak reformasi hukum pertanahan nasional terjadi pada 24 desember 1960 pada hari itu, rancangan Undang-Undang Pokok Agraria disetujui dan disahkan menjadi Undang-Undang 5 Tahun 1960. Dengan berlakunya UUPA tersebut, untuk pertama kalinya pengaturan tanah di Indonesia menggunakan produk hukum nasional yang bersumber dari hukum adat. Dengan ini pula *Agrarische wet* dinyatakan dicabut dan tidak berlaku. Tahun 1960 ini menandai berakhirnya dualisme hukum agraria di Indonesia.

Pada 1964, melalui Menteri Agraria nomor 1 Tahun 1964, ditetapkan tugas, susunan, dan pimpinan Departemen Agraria. Peraturan tersebut nantinya disempurnakan dengan Peraturan Menteri Agraria Nomor 1 Tahun 1965 yang mengurai tugas Departemen Agrarian serta menambahkan Direktorat Transmigrasi dan kehutanan kedalam organisasi. Pada Periode ini, Terjadi penggabungan antara kantor Inspeksi Agraria-departemen dalam Negeri, Direktorat Tata Bumi Departemen pertanian, Kantor pendaftaran Tanah-Departemen kehakiman.

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

4. Orde Baru 1965- 1988:

Pada 1965, Departemen Agraria kembali diciutkan secara kelembagaan menjadi Direktorat hanya saja, cakupannya ditambah dengan Direktorat bidang Transmigrasi sehingga namanya menjadi **Direktorat Jenderal Agraria dan Transmigrasi** dibawah departemen dalam Negeri penciptaan ini dilakukan oleh Pemerintah Orde Baru dengan alasan efisiensi dan penyederhanaan organisasi.

Masih ditahun yang sama, terjadi perubahan organisasi yang mendasar, Direktorat Jenderal Agraria tetap menjadi salah satu bagian dari departemen Dalam Negeri dan berstatus Direktorat, sedangkan permasalahan transmigrasi ditarik kedalam Departemen Veteran, Transmigrasi, dan Koperasi.

Pada 1972, Keputusan Menteri Dalam Negeri Nomor 145 Tahun 1969 dicabut dan diganti dengan keputusan Menteri Dalam Negeri 88 Tahun 1972 Yang menyebutkan penyatuan instansi Agraria didaerah Ditingkat provinsi, dibentuk Kantor Direktorat Jenderal Agraria Provinsi, Sedangkan ditingkat kabupaten/kota Dibentuk Kantor Sub Direktorat Agraria Kabupaten/kotamadya.³³

F. Sejarah Kebijakan Pertanahan.

1. Periode 1945 – 1960.

Kebijakan pertanahan pada periode ini difokuskan pada pembenahan penguasaan dan kepemilikan dari sistem kolonialis menjadi sistem

³³*Ibid,*

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

nasional. Dalam periode ini penguasaan dan kepemilikan asing dinasionalisasi dan penguasaan, pemilikan tanah luas, perdikan, swapraja, partikelir, dan lainnya yang tidak sesuai dengan jiwa kemerdekaan diatur kembali penggunaan dan penguasaannya oleh negara untuk kepentingan nasional.

2. Periode 1960 – 1967.

Dimasa ini kebijakanya melanjutkan Kebijakan yang telah dijalankan sebelumnya, dalam periode ini kebijakan diarahkan pada distribusi dan retribusi tanah oleh negara yang diperuntukan untuk petani gurem/petani penggarap dan buruh tani, periode ini dikenal dengan periode *Land Reform*.

3. Periode 1967 – 1997.

Sejalan dengan pertumbuhan dan Pengembangan ekonomi nasional, Pada periode ini pembanguna Pertanahan diarahkan untuk mendukung kebijakan penanaman modal dan investasi, tanpa meninggalkan untuk kebijakan untuk sertifikasi tanah-tanah golongan ekonomi lemah.

4. Periode 1997 – 2005.

Diawal era eformasi kebijakan pertanahan lebih diarahkan kepada kebijakan-kebijakan yang langsung menyentuh masyarakat, yang menekankan pada pendaftaran tanah yang dikuasai/dimiliki golongan – golongan tidak mampu.

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

5. Periode 2005 –sampai sekarang

Pada Periode ini, kebijakan pertanahan diarahkan pada “tanah untuk keadilan dan kesejahteraan rakyat” periode ini ditandai dengan kebijakan penertiban tanah terlantar, penyelesaian sengketa, Retribusi tanah, Peningkatan legalisasi aset-tanah masyarakat yang diimplementasikan melalui Reforma Agraria.³⁴

³⁴ *Ibid*,

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

BAB V**KESIMPULAN DAN SARAN****A. Kesimpulan**

Dari pembahasan diatas, penulis mengambil kesimpulan sebagai berikut:

1. Dengan dikeluarkannya Peraturan Presiden Nomor 20 Tahun 2015 Tentang Tugas Dan Fungsi Badan Pertanahan Nasional. Dengan harapan mampu untuk menyelesaikan semua permasalahan dengan tanah dan dapat meminimalisir terjadinya Sengketa atas tanah.
2. Hambatan yang dimiliki oleh Badan Pertanahan Nasional Kota Subulussalam dalam menyelesaikan kasus pertanahan yang terjadi di desa Pasir Belo antara lain adalah Legalitas kepemilikan lahan yang kurang jelas, Tidak adanya Itikad baik dari pihak perusahaan, dan dalam hal ini Badan Pertanahan Nasional Kota Subulussalam tidak bertindak dengan tegas dalam menyelesaikan sengketa lahan seperti kewenangan yang dimilikinya.

B. Saran

Dari pembahasan dan kesimpulan diatas, Penulis memberikan saran sebagai berikut:

1. Hendaknya masyarakat ataupun lembaga lainnya agar mendaftarkan tanah hak miliknya ke BPN dan juga memasang patok batas, guna dan tujuan untuk menghindari dan mengurangi terjadinya sengketa tanah. Serta Badan Pertanahan Nasional dalam memberikan hak Guna Usaha berdasarkan penelitian yang bijak dan dapat

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

mengambil langkah yang cermat dalam menyelesaikan sengketa yang terjadi di desa Pasir Belo kecamatan Sultan Daulat.

2. Hendaknya hambatan yang terjadi dapat diminimalisir oleh Badan Pertanahan Nasional Kota Subulussalam sesuai dengan kewenangan yang dimilikinya. Serta memberitahukan kepada masyarakat dalam menangani masalah yang ada.



Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:

- a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
- b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.

2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

DAFTAR PUSTAKA

A. Buku

- Ali Achmad c, *Hukum Agraria (pertanahan Indonesia)* Jakarta, Pustaka Media. 2004.
- Ali Chomzah, *Hukum Pertanahan*, Jakarta : Prestasi Pustaka, 2003.
- Amiruddin, *Pengantar metode Penelitian Hukum*, Jakarta, PT Rajawali Persada, 2003.
- A.p. Parlindungan, *Pendaftaran Tanah di Indonesia*, Mandar Maju, Bandung, 1999.
- Arie Sukanti, *Kewenangan Pemerintahan di Bidang Pertanahan*, PT Raja Grafindo Persada, Jakarta: 2008.
- Bambang Eko Supriyadi, *Hukum Agraria Kehutanan*, Jakarta : PT Raja Grafindo, 2013.
- Bambang Waluyo, *Peneltian Hukum Dalam Praktek*, jakarta: Sinar Grafika, 2002.
- Bambang Eko Supriyadi, *Hukum Agraria Kehutanan*, Pt Raja Grafindo Persada, Jakarta.
- Efendi Perangin, *Hukum Agraria diIndonesia*, Jakarta : PT Raja Grafindo, 1994.
- Gunawan Widjaja, *Alternatif penyelesaian sengketa*. PT raja Grafindo Persada, jakarta, 2001.



Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

Juliansyah Noor, *Metodologi Penelitian Skripsi, Tesis, Disertai Karya ilmiah*, Jakarta, Kecana, 2011, Edisi ke-1, Cet Ke-1.

Lysa Anggraini, *Pengantar ilmu hukum*, Pekan Baru Suska Press, 2014.

Supriadi, *Hukum Agraria*, Jakarta, Sinar grafika, 2012.

Susanti Adi Nungroho, *Penyelesaian Sengketa Arbitrase Dan Penerapan Hukumnya*, (Jakarta, Prenada media Group, 2015).

Sunggono Bambang, *metodologi penelitan hukum*, Jakarta, PT. Raja Grafindo Persada, 2003.

Sumarto, “*Penanganan dan Penyelesaian Konflik Pertanahan dengan Prinsip Win-Win Solution oleh Badan Pertanahan Nasional RI*” Disampaikan pada Diklat Direktorat Konflik Pertanahan Keemendagri RI tanggal 19 september, 2012, h 2.

Urip santoso, *Hukum Agraria dan hak-hak atas Tanah*, Jakarta, Prenada media, 2005.

Widjaja, Gunawan, *Alternatif penyelesaian Sengketa*, PT. Raja Grafindo Persada, Jakarta, 2001.

B. Jurnal.

Ahmad Zaki, Skripsi: *Anilisa Sengketa Pertanahan di Desa Pasir Indah Kecamatan Kunto Darussalam Kabupaten Rokan Hulu*” Pekanbaru: UIN RIAU 2016).

C. Undang-Undang

Undang-Undang Nomor. 5 Tahun 1960. Tentang Pokok Agraria

D. Internet

Insiklopedia bebas, *Luas Wilayah Indonesia*, diakses dari <http://id.m.wikipedia.org> > wiki > pada tanggal 28 januari 2019 pukul 5,43

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

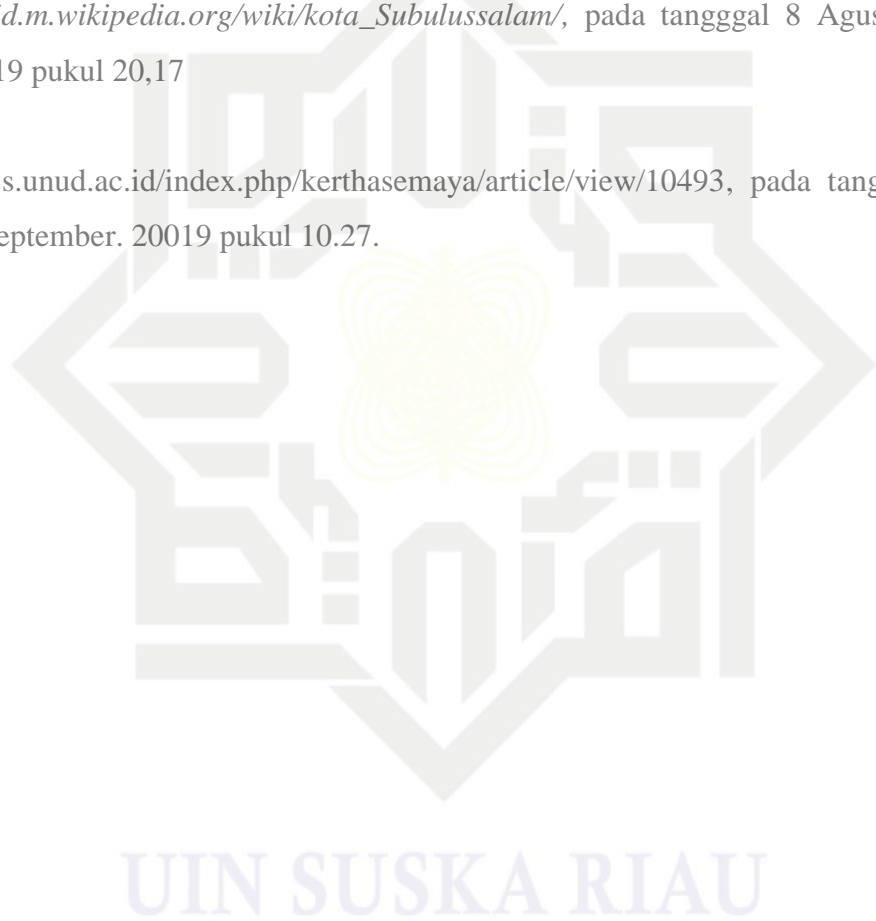
1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

HelmySuhendar, "makalah tentang tanah", diakses dari <http://helmysuhendar.blogspot.com/makalah-tanah-struktur-jenis.html/>, pada 28 januari 2019 pukul 5.13.

Republik Indonesia. *Undang-Undang no.2 tahun 2015 tentang Badan Pertanahan Nasional*", diakses dari [http://id.m.Wikipedia.org/wiki-Badan Pertanahan-Nasional](http://id.m.wikipedia.org/wiki-Badan_Pertanahan-Nasional), pada tanggal 26 oktober 2018.

https://id.m.wikipedia.org/wiki/kota_Subulussalam/, pada tanggal 8 Agustus 2019 pukul 20,17

<http://ojs.unud.ac.id/index.php/kerthasemaya/article/view/10493>, pada tanggal 3 september. 20019 pukul 10.27.





Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

© Hak cipta milik UIN Suska Riau

State Islamic University of Sultan Syarif Kasim Riau

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

**PENGESAHAN
PERBAIKAN SKRIPSI**

Skripsi dengan judul "KEWENANGAN BADAN PERTANAHAN NASIONAL KOTA SUBULUSSALAM DALAM MENANGANI KASUS PERTANAHAN YANG TERJADI AKIBAT KONFLIK MENURUT PERATURAN PRESIDEN NOMOR 20 TAHUN 2015 TENTANG BADAN PERTANAHAN NASIONAL", yang ditulis oleh:

Nama : HANALDI SYAH
NIM : 11427100477
Program Studi : ILMU HUKUM

Telah dimunaqasahkan pada:

Hari / Tanggal : Selasa, 10 Desember 2019
Waktu : 08.00 WIB
Tempat : Ruang Sidang Munaqasyah Fakultas Syariah dan Hukum

Telah diperbaiki sesuai dengan permintaan Tim Penguji Munaqasyah Fakultas Syariah dan Hukum Universitas Islam Negeri Sultan Syarif Kasim Riau.

Pekanbaru, 12 Desember 2019 M
TIM PENGUJI MUNAQASYAH

Petua
Irdaus, SH., MH

Sekretaris
Oni Alizon, SH., MH

Penguji I
Basir, S.HL., MH

Penguji II
Afrinaldi, SH., MA

Kepala Bagian Tata Usaha
Fakultas Syariah dan Hukum

ERNI, S.Sos., MM
NIP. 19680226 199103 2 002



KEMENTERIAN AGAMA REPUBLIK INDONESIA
UNIVERSITAS ISLAM NEGERI SULTAN SYARIF KASIM RIAU
FAKULTAS SYARI'AH & HUKUM

كلية الشريعة و القانون

FACULTY OF SYARI'AH AND LAW

Jl. H. R. Soebrantas No. 155 KM. 15 Tuahmadani Tampan - Pekanbaru 28293 PO. Box. 1004 Telp / Fax. 0761-562052
Web. www.fasih.uin-suska.ac.id Email : fasih@uin-suska.ac.id

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

© Hak cipta milik UIN SUSKA RIAU

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

UIN SUSKA RIAU/PP.00.9/1528/2019

Pekanbaru, 20 Februari 2019

Bina
: (atau) Proposal
: Mohon Izin Riset

Kepada
Yth. Kepala Dinas Penanaman Modal dan PTSP
Provinsi Riau

Assalamu 'alaikum warahmatulahi wabarakatuh

Disampaikan bahwa salah seorang mahasiswa Fakultas Syari'ah dan Hukum Universitas Sultan Syarif Kasim Riau :

Nama : HANALDISYAH
NIM : 11427100477
Jurusan : Ilmu Hukum S1
Semester : X (Sepuluh)
Lokasi : Kantor Badan Pertanahan kota Subulussalam

bermaksud akan mengadakan riset guna menyelesaikan Penulisan Skripsi yang berjudul : KEWENANGAN BADAN PERTANAHAN NASIONAL KOTA SUBULUSSALAM DALAM MENANGANI KONFLIK PERTANAHAN MENURUT PERATURAN PRESIDEN NO 20 TAHUN 2015 TENTANG BADAN PERTANAHAN NASIONAL (studi kasus didesa Pasir Belo kota Subulussalam Aceh)

Pelaksanaan kegiatan riset ini berlangsung selama 3 (tiga) bulan terhitung mulai tanggal surat ini dibuat. Untuk itu kami mohon kiranya kepada Saudara berkenan memberikan izin guna terlaksana riset dimaksud.

Demikian disampaikan, terima kasih.

a.n. Rektor
Dekan



Dr. Drs. H. Hajar., M.Ag
NIP. 19580712 198603 1005

Tembusan :
Rektor UIN Suska Riau



SURAT PERNYATAAN PENGUASAAN FISIK

Yang bertanda tangan di bawah ini :

- DIA KASUGIHEN
: 65 Tahun
: Islam
: Petani/Pekebun
: Kampong Suka Maju
Kec, Sultan Daulat Kota Subulussalam

Saya ini menyatakan bahwa saya dengan l'tikad baik telah menguasai tanah yang
dibetah di :

Kampong : Bawan
Kecamatan : Sultan Daulat
Kota : Subulussalam
dipergunakan : Kebun Kelapa Sawit
luas Tanah : 100 Meter x 250 Meter

Adapun batas - batas tanah tersebut adalah :

- Sebelah Timur Berbatas dengan	: Nini Kudadiri
- Sebelah Barat Berbatas dengan	: Pasar
- Sebelah Utara Berbatas dengan	: Perato
- Sebelah Selatan Berbatas dengan	: Buyung Boy

Sidang tanah tersebut buka sendiri dari menggarap dan menguasai lahan pada Tahun
1997, yang sampai saat ini saya kuasai secara terus menerus tidak dijadikan jaminan
hutang dan tidak dalam sengketa.

Surat pernyataan ini saya buat dengan sebenarnya dengan penuh tanggung jawab, dan saya
bersedia untuk mengangkat sumpah apabila pernyataan ini tidak benar, saya bersedia di
untut oleh Pihak yang berwenang.

Bawan, 27 Januari 2015
Yang membuat pernyataan

UIN SUSKA



Saksi Saksi

1. Nini Kuda diri
2. Perato
3. Buyung Boy

(1.) (2.)
(3.)

Mengetahui;
Kepala Kampong Bawan



© Hak cipta milik UIN Suska Riau

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:

- a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
- b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.

2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

State Islamic University of Sultan Syarif Kasim Riau



PEMERINTAH KOTA SUBULUSSALAM

DINAS PERTANAHAN

Jl. Teuku Umar No. 100 Kampong Subulussalam Utara Kecamatan Simpang Kiri
Subulussalam 24782 e-mail : Disperta13@gmail.com

SURAT KETERANGAN

Nomor:423.6/105/2019

© Hak cipta milik UIN Suska Riau

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

State Islamic University of Sultan Syarif Kasim Riau

Sehubungan dengan dibawah ini, Kepala Dinas Pertanahan Kota Subulussalam Menerangkan bahwa:

: Hanaldisyah

: 11427100477

: Universitas Islam Negeri Sultan Syarif Kasim Riau

: Syariah dan Hukum/ Ilmu Hukum

Narasumber tersebut diatas telah melakukan penelitian pada Dinas Pertanahan kota Subulussalam untuk penyusunan skripsi dari tanggal 19 maret s/d 08 april 2019 dengan judul **"KEWENANGAN BADAN PERTANAHAN NASIONAL KOTA SUBULUSSALAM DALAM MENANGANI KONFLIK PERTANAHAN MENURUT PERATURAN PRESIDEN NOMOR 20 TAHUN 2015 TENTANG BADAN PERTANAHAN NASIONAL"** (Studi Kasus di Desa Pasir Belo Kota Subulussalam Aceh)

Demikian Surat Keterangan ini dibuat, untuk dapat dipergunakan sebagaimana mestinya.

Subulussalam, 08 April 2019

Kepala Dinas Pertanahan Kota Subulussalam 34


SYAHTUDIN, SPd.I, MM
Pembina Tk. I / (IV/b)
NIP. 19780206 200604 1 003



C. Arsip



PEMERINTAH KOTA SUBULUSSALAM
KANTOR KESATUAN BANGSA DAN POLITIK
JL. Prof. Ali Hasmi/Pendopo Walikota, No. 56 Telp/Fax. (0627) 31544
PENANGGALAN BARAT

REKOMENDASI
NOMOR : 072 1042/2019

UIN PENELITIAN

Merujuk surat dari Dinas Penanaman Modal Dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Provinsi Riau Nomor : 533/DTPTP/NNN IZIN-RISET/19503 tanggal 04 Maret 2019 perihal permohonan ijin Pelaksanaan Kegiatan Penelitian, dan memberikan REKOMENDASI atas kegiatan Pelaksanaan Kegiatan Penelitian/Pra Riset dan Pengumpulan Data untuk Skripsi di Kota Subulussalam yang akan dilaksanakan oleh :

: HANALDISYAH

: Mahasiswa

: 11427100477

: Ilmu Hukum

: Syariah dan Hukum

: Dusun Insan Bakti Kampong Gunung Bakti Kec. Sultan Daulat
Kota Subulussalam Provinsi Aceh

: RONI KURNIAWAN, SH.MH

: Badan Pertanahan Nasional Kota Subulussalam Provinsi Aceh

: 15 Maret s/d 22 Maret 2019

: Kewenangan Badan Pertanahan Nasional Kota Subulussalam Dalam Menangani
Konflik Pertanahan Menurut Peraturan Presiden Nomor 20 Tahun 2015 Tentang
Badan Pertanahan Nasional (Studi Kasus Di Desa Pasir Bello Kota Subulussalam
Provinsi Aceh).

Ditentukan sebagai berikut :

1. Sebelum melaksanakan penelitian/survey/riset wajib terlebih dahulu melaporkan kepada pejabat pemerintah terkait untuk mendapat petunjuk, dengan sebelumnya memberikan copy/salinan/tembusan surat ijin penelitian/survey/riset yang diterbitkan oleh Badan Pertanahan Nasional Kota Subulussalam;
2. Pelaksanaan Penelitian/survey/riset tidak dilaksanakan untuk tujuan tertentu yang dapat mengganggu stabilitas pemerintahan. Untuk penelitian yang dapat dukungan dana dari seponsor baik dalam negeri maupun luar negeri, agar dijelaskan pada saat mengajukan perijinan. Tidak membahas masalah politik dan atau agama yang dapat menimbulkan tergantungnya stabilitas keamanan dan ketertiban;
3. Wajib menjaga tata tertib dan mentaati ketentuan – ketentuan yang berlaku;
4. Surat Rekomendasi ini dapat dicabut dan dinyatakan tidak berlaku apabila pemegang surat Rekomendasi ini tidak mentaati/mengindahkan peraturan yang berlaku;

Demikian untuk dilaksanakan sebagaimana mestinya.

SUBULUSSALAM, 15 Maret 2019
KEPALA KANTOR KESATUAN BANGSA DAN POLITIK
KOTA SUBULUSSALAM

© Hak cipta milik UIN Suska Riau

State Islamic University of Sultan Syarif Kasim Riau

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber;
- a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah;
- b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau;
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

PEMERINTAH PROVINSI RIAU

DINAS PENANAMAN MODAL DAN PELAYANAN TERPADU SATU PINTU

Gedung Menara Lancang Kuning Lantai I & II Komp. Kantor Gubernur Riau
Jl. Jenderal Sudirman No. 460 Telp. (0761) 39119 Fax. (0761) 39117, PEKANBARU
Email : dpmptsp@riau.go.id

Kode Pos : 28126



182010

REKOMENDASI

Nomor : 503/DPMPTSP/NON IZIN-RISET/19503
TENTANG

PELAKSANAAN KEGIATAN RISET/PRA RISET DAN PENGUMPULAN DATA UNTUK BAHAN SKRIPSI

Kepada Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Provinsi Riau, setelah membaca permohonan Riset dari : Dekan Fakultas Syariah dan Hukum UIN Suska Riau, Nomor : 500/PP/PP.00/1528/2019 Tanggal 20 Februari 2019, dengan ini memberikan rekomendasi kepada:

- | | | |
|----------------------|---|---|
| 1. Nama | : | HANALDISYAH |
| 2. NIM / KTP | : | 11427100477 |
| 3. Program Studi | : | ILMU HUKUM |
| 4. Jenjang | : | S1 |
| 5. Alamat | : | PEKANBARU |
| 6. Judul Penelitian | : | KEWENANGAN BADAN PERTANAHAN NASIONAL KOTA SUBULUSSALAM DALAM MENANGANI KONFLIK PERTANAHAN MENURUT PERATURAN PRESIDEN NOMOR 20 TAHUN 2015 TENTANG BADAN PERTANAHAN NASIONAL (STUDI KASUS DI DESA PASIR BELLO KOTA SUBULUSSALAM ACEH) |
| 7. Lokasi Penelitian | : | 1. BADAN PERTANAHAN NASIONAL KOTA SUBULUSSALAM PROVINSI ACEH
2. DESA PASIR BELLO KOTA SUBULUSSALAM PROVINSI ACEH |

Penelitian ditentukan sebagai berikut:

Tidak melakukan kegiatan yang menyimpang dari ketentuan yang telah ditetapkan yang tidak ada hubungan dengan kegiatan ini.

Pelaksanaan Kegiatan Penelitian dan Pengumpulan Data ini berlangsung selama 6 (enam) bulan terhitung mulai tanggal rekomendasi ini dibuat.

Demi Rekomendasi ini diberikan agar dapat digunakan sebagaimana mestinya dan kepada pihak yang terkait diharapkan untuk dapat memberikan kemudahan dan membantu kelancaran kegiatan Penelitian dan Pengumpulan Data ini dan terima kasih.

Dibuat di : Pekanbaru
Pada Tanggal : 4 Maret 2019



Dilaksanakan Secara Elektronik Melalui :
Sistem Informasi Manajemen Pelayanan (SIMPEL)
DINAS PENANAMAN MODAL DAN
PELAYANAN TERPADU SATU PINTU
PROVINSI RIAU

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

© Hak cipta milik UIN Suska Riau

State Islamic University of Sultan Syarif Kasim Riau

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber.
- a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
- b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

KEMENTERIAN AGAMA REPUBLIK INDONESIA
UNIVERSITAS ISLAM NEGERI SULTAN SYARIF KASIM RIAU
FAKULTAS SYARI'AH & HUKUM

كلية الشريعة و القانون

FACULTY OF SYARI'AH AND LAW

Jl. H. R. Soebrantas No. 155 KM. 15 Tuahmadani Tampan - Pekanbaru 28293 PO. Box. 1004 Telp / Fax. 0761-562052
Web. www.fasih.uin-suska.ac.id Email fasih@uin-suska.ac.id

Pekanbaru, 20 Februari 2019

: UIN/04/F.I/PP.00.9/1528/2019

: Bisa

: (Lampiran) Proposal

: Mohon Izin Riset

Kepada

Yth. Kepala Dinas Penanaman Modal dan PTSP

Provinsi Riau

Assalamu 'alaikum warahmatullahi wabarakatuh

Disampaikan bahwa salah seorang mahasiswa Fakultas Syari'ah dan Hukum
Universitas Sultan Syarif Kasim Riau :

Nama	: HANALDISYAH
NIM	: 11427100477
Jurusan	: Ilmu Hukum S1
Semester	: X (Sepuluh)
Lokasi	: Kantor Badan Pertanahan kota Subulussalam

bermaksud akan mengadakan riset guna menyelesaikan Penulisan Skripsi yang berjudul
: KEWENANGAN BADAN PERTANAHAN NASIONAL KOTA SUBULUSSALAM
DALAM MENANGANI KONFLIK PERTANAHAN MENURUT PERATURAN
PRESIDEN NO 20 TAHUN 2015 TENTANG BADAN PERTANAHAN NASIONAL (studi
kasus didesa Pasir Belo kota Subulussalam Aceh)

Pelaksanaan kegiatan riset ini berlangsung selama 3 (tiga) bulan terhitung mulai
tanggal surat ini dibuat. Untuk itu kami mohon kiranya kepada Saudara berkenan
memberikan izin guna terlaksana riset dimaksud.

Demikian disampaikan, terima kasih.

a.n. Rektor
Dekan

Dr. Drs. H. Hajar., M.Ag
NIP. 19580712 198603 1 005

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

© Hak cipta milik UIN Suska Riau
State Islamic University of Sultan Syarif Kasim Riau

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber.

a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.

b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.

Tembusan :
Rektor UIN Suska Riau

Banda Aceh, 13 maret 2019

: permohonan izin riset

: Yth Badan Kesbang dan linmas Provinsi Aceh di Banda Aceh

Dengan hormat saya yang bertanda tangan dibawah ini :

: Hanaldisyah

: 11427100477

: Ilmu hukum S1

: X (sepuluh)

Termaksud mengajukan izin riset yang ditujukan kepada kantor Badan Pertanahan Nasional Kota Subulussalam, dalam Rangka Penyusunan dan Penulisan Skripsi dengan judul "KEWENANGAN BADAN PERTANAHAN NASIONAL KOTA SUBULUSSALAM DALAM MENANGANI KONFLIK PERTANAHAN MENURUT PERATURAN PRESIDEN NOMOR 20 TAHUN 2015 TENTANG BADAN PERTANAHAN NASIONAL (Studi kasus di Desa Pasir Belo Kota Subulussalam Aceh)"

Demikian surat permohonan ini saya sampaikan, Atas perhatiannya dan bantuannya saya ucapkan terima kasih.

Termohon



Hanaldisyah
11427100477

© Hak cipta milik UIN Suska Riau

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

State Islamic University of Sultan Syarif Kasim Riau



UIN SUSKA RIAU



SURAT PERNYATAAN PENGUASAAN FISIK TANAH

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

© Hak Cipta dimiliki UIN SUSKA RIAU
State Islamic University of Sultan Syarif Kasim Riau

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

Yang bertanda tangan di bawah ini :

Nama : **SALAMUDIN SYAH**
 Tempat Tgl Lahir : 39 Tahun
 Pekerjaan : Petani/Pekebun
 Agama : Islam
 Alamat : Jambi Baru Kecamatan Sultan Daulat Kota Subulussalam

dan ini menyatakan bahwa saya memiliki sebidang tanah Perkebunan dengan baik, dan telah menguasai nya yang terletak di :

Kampung : Pasir Belo
 Dusun : Sampai Niat
 Kecamatan : Sultan Daulat
 Kota : Subulussalam
 Dipergunakan : Perkebunan
 Luas Tanah : 153.900 M2

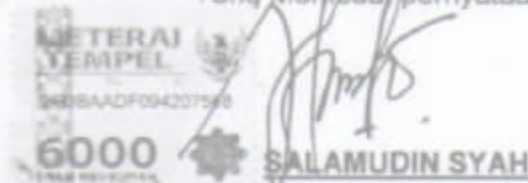
Sedapun batas-batas sebagai berikut :

- Sebelah Utara berbatas dengan : Sdr. Alm Nabun/Wahidin
- Sebelah Selatan berbatas dengan : Sdr. Ngatemen
- Sebelah Timur berbatas dengan : Jalan Desa Lama/Cok Hargas
- Sebelah Barat berbatas dengan : Sdr. H.Darman

Sebidang tanah tersebut saya kuasai sejak tahun 1998 yang lalu, sampai saat ini saya kuasai secara terus menerus tidak dijadikan jaminan hutang dan tidak dalam sengketa, terletak di Desa Pasir Belo Dusun Sampai Niat.

Sehingga surat pernyataan ini saya buat dengan sebenarnya dengan penuh tanggung jawab apabila pernyataan saya ini tidak benar saya bersedia di tuntutan sesuai undang-undang yang berlaku di Negara Kesatuan Republik Indonesia.

Pasir Belo, 15 Maret 2014
 Yang Membuat pernyataan



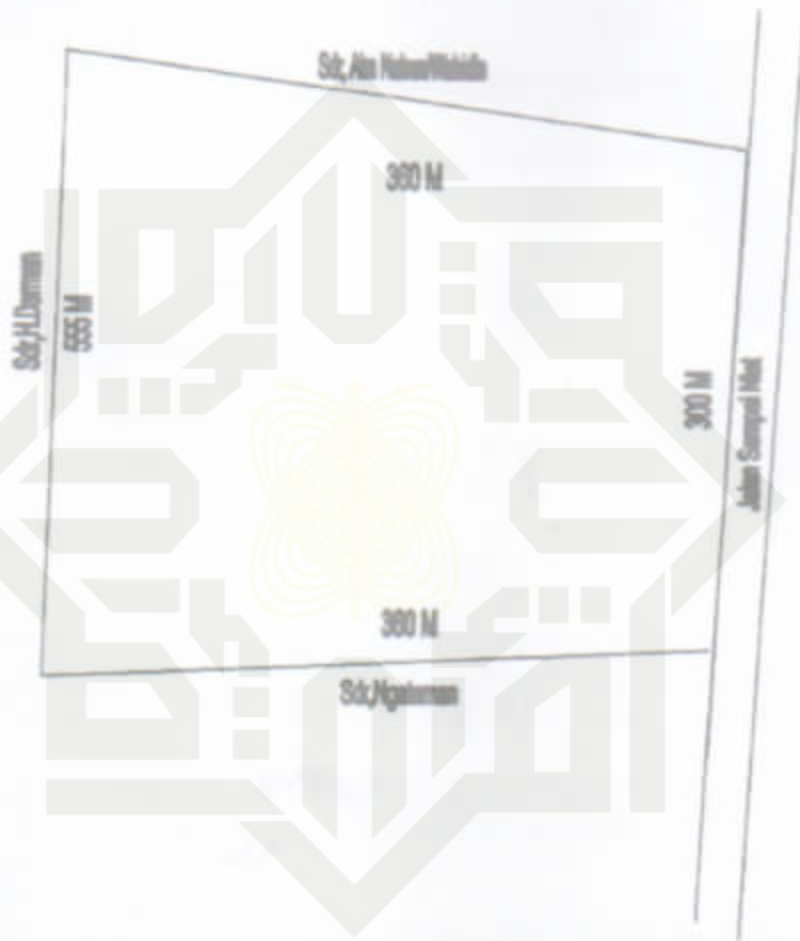
Taksi - Saksi :

1. Sdr. Ngatimen
2. Sdr. H. Darman
3. Sdr. WAHIDIN

Mengetahui,
 Kepala Kampung Pasir Belo



SKET / GAMBAR PENGUASAAN PISIK TANAH



UIN SUSKA RIAU

Pasir Belo, 15 Maret 2014
Yang Membuat pernyataan

SALAMUDIN SYAH

Saksi Saksi :

1. Sdr. Ngatimen
2. Sdr. H. Darman

3. sdr WAHIDIN

(Mht)

Menggetahui

© Hak cipta milik UIN Suska Riau

State Islamic University of Sultan Syarif Kasim Riau

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.



UIN SUSKA RIAU

Pemerintah Kota Subulussalam
Badan Pengelolaan Keuangan Daerah
Kantor Walikota dan Laras Kecamatan Simpang Kiri Kota Subulussalam

00028923

BUKAN MERUPAKAN SUKTI KEPERAWATAN HAK

**SURAT PEMBERITAHUAN PAJAK TERHUTANG
PAJAK BUMI DAN BANGUNAN TAHUN**

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

© Hak cipta milik UIN Suska Riau

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:

- Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
- Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.

2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

State Islamic University of Sultan Syarif Kasim Riau

ETAK OBJEK PAJAK
A GANE - SUBULOSSALAM

SALAMUDIN SYAH
DSN JASA BAKTI
RT: RW:
GUNUNG B AKTI
SUBULUSSALAM
NPWP:

NP,VP

NO	LOKASI	LUAS (M2)	KELAS	NUJUP PER M2 (Rp)	TOTAL NUJUP (Rp)
1	Perumahan Rukun Warga 093	47.000	093	1.200	56.400.000

Nilai dasar pengenaan PBB =	56.400.000
NJOPTidak Kena Pajak) =	10.000.000
Nilai penghitungan PBB =	46.400.000
=	0,125 %
Pemutangan =	58.000
JUMLAH DAN BANGUNAN YANG HARUS DIRAYAR (Rp)	58.000

1. DAN BANGUNAN YANG HARUS DIBAYAR (Rp) JUDUL DELAPAN RIBU RUPIAH	58.000
--	--------

29 NOV 2019 TSUNOBUSSAGAM 01 JUL 2019

KEPALA BADAN

THE DIADI HASMI, SE
NIP : 195906091989031002

PEMERINTAH KOTA SUBULUSSALAM
BADAN PENGELOLAAN KEUANGAN DAERAH
Rumoh Ternakoran Loe Oran Krempidan Sumpang Kiri Kota Subulussalam

0059150

SURAT TANDA TERIMA SETORAN (STTS)

Tempest, Pennsylvania

LOKET PBB-DPPKDD
PBB Th. 2019 dan:

St

SALAMUDIN SYAH
SULTAN DAULAT
PASTIR BELO

W a

Thomas / Kiel

Ka

11 75 040 001 001-0198 0

Copyright © 2004

58.000

Tanjung Pagar Tempo

29 November 2019

jumlah yang harus dibayar (untuk 1000 liter) pada bulan ke-10 adalah Rp. 1.000.000,00 (setelah tanggal jatuh tempo).

2000

MIX

W

TGL. PEMBAYARAN : 01^{IV} Juli 2019

POKOK PBB : Rp. 58,000



Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

© Hak cipta milik UIN Suska Riau
State Islamic University of Sultan Syarif Kasim Riau

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

PEMERINTAH KOTA SUBULUSSALAM KECAMATAN SULTAN DAULAT KAMPONG BAWAN

SURAT KETERANGAN TANAH

Nomor : 46/02/2015

Yang bertanda tangan di bawah ini Kepala Kampung Bawan Kecamatan Sultan Daulat Kota Subulussalam, dengan ini menerangkan bahwa :

Nama : Hasmar Sinaga
Umur : 29 Tahun
Agama : Islam
Pekerjaan : Wiraswasta
Alamat : Desa Pancang Dua Kec. Singkil Utara Kab. Aceh Singkil

Menar bahwa nama tersebut di atas menggarap sebidang tanah hutan bebas 1 (satu) Hektar yang terletak di kawasan dalam Kampung Bawan Kec. Sultan Daulat Kota Subulussalam, Adapun batas-batas tanah tersebut di atas adalah :

Sebelah Utara berbatasan dengan Ranang Manik
Sebelah Timur berbatasan dengan Sungai Bawan
Sebelah Selatan berbatasan dengan
Sebelah Barat berbatasan dengan Heppy Sinaga

Demikianlah Surat Keterangan ini dibuat dengan sebenarnya dan diberikan kepada yang bersangkutan untuk dapat dipergunakan seperlunya.

Catatan : Apabila terdapat kekeliruan dalam penetapan Surat Keterangan Tanah ini maka akan diadakan perbaikan sebagaimana mestinya.

Dikeluarkan di : Kampong Bawan
Pada Tanggal : 26-2-2015

Kepala Kampung Bawan

(Stempel dan Tanda Tangan)

Jamaluddin Maha



© Hak cipta milik UIN Suska Riau

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

State Islamic University of Sultan Syarif Kasim Riau

PEMERINTAH KOTA SUBULUSSALAM KECAMATAN SULTAN DAULAT KAMPONG BAWAN

SURAT KETERANGAN TANAH

Nomor: 45/02/2015

Yang bertanda tangan di bawah ini Kepala Kampung Bawan Kecamatan Sultan Daulat Kota Subulussalam, dengan ini menerangkan bahwa:

Nama : Heppy Sinaga
 Umur : 32 Tahun
 Agama : Islam
 Pekerjaan : Wiraswasta
 Alamat : Desa Pancang Dua Kec. Singkil Utara Kab. Aceh Singkil

Sehingga nama tersebut di atas menggarap sebidang tanah hutan bebas 2 (dua) Hektar yang terletak di kawasan dalam Kampung Bawan Kec. Sultan Daulat Kota Subulussalam, Adapun batas-batas tanah tersebut di atas adalah:

Sebelah Utara berbatasan dengan Tima Tumangger
 Sebelah Timur berbatasan dengan Hasmar Sinaga
 Sebelah Selatan berbatasan dengan
 Sebelah Barat berbatasan dengan Arisman Sinaga

Demikianlah Surat Keterangan ini dibuat dengan sebenarnya dan diberikan kepada yang bersangkutan untuk dapat dipergunakan seperlunya.

Catatan:
 Apabila terdapat kekeliruan dalam penetapan Surat Keterangan Tanah ini maka akan diadakan perbaikan sebagaimana mestinya.

Dikeluarkan di : Kampung Bawan
 Pada Tanggal : 26-2-2015





© Hak cipta milik UIN Suska Riau

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:

- Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
- Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.

2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

State Islamic University of Sultan Syarif Kasim Riau

PEMERINTAH KOTA SUBULUSSALAM KECAMATAN SULTAN DAULAT KAMPONG BAWAN

SURAT KETERANGAN TANAH

Nomor: 44/02/2015

Yang bertanda tangan di bawah ini Kepala Kampung Bawan Kecamatan Sultan Daulat Kota Subulussalam, dengan ini menerangkan bahwa :

Nama : Arisman Sinaga
Umur : 30 Tahun
Agama : Islam
Pekerjaan : Wiraswasta
Alamat : Desa Pancang Dua Kec. Singkil Utara Kab. Aceh Singkil

Menyatakan bahwa nama tersebut di atas menggarap sebidang tanah hutan bebas 2 (dua) Hektar yang terletak di kawasan dalam Kampung Bawan Kec. Sultan Daulat Kota Subulussalam, dan batas-batas tanah tersebut di atas adalah :

Sebelah Utara berbatasan dengan Bicar Sinaga
Sebelah Timur berbatasan dengan Heppy Sinaga
Sebelah Selatan berbatasan dengan
Sebelah Barat berbatasan dengan Kebun Pangat

Demikianlah Surat Keterangan ini dibuat dengan sebenarnya dan diberikan kepada yang bersangkutan untuk dapat dipergunakan seperlunya.

Catatan

Apabila terdapat kekeliruan dalam penetapan Surat Keterangan Tanah ini maka akan diadakan perbaikan sebagaimana mestinya.

Dikeluarkan di : Kampung Bawan
Pada Tanggal : 26-2-2015



Ismailuddin Maha



© Hak cipta milik UIN Suska Riau

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

State Islamic University of Sultan Syarif Kasim Riau

PEMERINTAH KOTA SUBULUSSALAM KECAMATAN SULTAN DAULAT KAMPONG BAWAN

SURAT KETERANGAN TANAH

Nomor: 43/02/2015

Yang bertanda tangan di bawah ini Kepala Kampung Bawan Kecamatan Sultan Daulat Kota Subulussalam, dengan ini menerangkan bahwa :

Nama : Tiama Tumangger
 Umur : 55 Tahun
 Agama : Islam
 Pekerjaan : PNS
 Alamat : Desa Pancang Dua Kec. Singkil Utara Kab. Aceh Singkil

Benar bahwa nama tersebut di atas menggarap sebidang tanah hutan bebas seluas 2 (dua) hektar yang terletak di kawasan dalam Kampung Bawan Kec. Sultan Daulat Kota Subulussalam, adapun batas-batas tanah tersebut di atas adalah :

Sebelah Utara berbatasan dengan Ranang Manik
 Sebelah Timur berbatasan dengan Hasinar Sinaga
 Sebelah Selatan berbatasan dengan Heppy Sinaga
 Sebelah Barat berbatasan dengan Bicar Sinaga

Demikianlah Surat Keterangan ini dibuat dengan sebenarnya dan diberikan kepada yang bersangkutan untuk dapat dipergunakan seperlunya.

Catatan

Apabila terdapat kekeliruan dalam penetapan Surat Keterangan Tanah ini maka akan diadakan perbaikan sebagaimana mestinya.

Dikeluarkan di : Kampong Bawan

Pada Tanggal : 26-2-2015





© Hak cipta milik UIN Suska Riau

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

State Islamic University of Sultan Syarif Kasim Riau

PEMERINTAH KOTA SUBULUSSALAM KECAMATAN SULTAN DAULAT KAMPONG BAWAN

SURAT KETERANGAN TANAH

Nomor : 42/02/2015

Yang bertanda tangan di bawah ini Kepala Kampung Bawan Kecamatan Sultan Daulat Kota Subulussalam, dengan ini menerangkan bahwa :

Nama : Bicar Sinaga
Umur : 56 Tahun
Agama : Islam
Pekerjaan : PNS
Alamat : Desa Pancang Dua Kec. Singkil Utara Kab. Aceh Singkil

Menyatakan bahwa nama tersebut di atas menggarap sebidang tanah hutan bebas 2 (dua) hektar yang terletak di kawasan dalam Kampung Bawan Kec. Sultan Daulat Kota Subulussalam, adapun batas-batas tanah tersebut di atas adalah :

Sebelah Utara berbatasan dengan Ranang Manik
Sebelah Timur berbatasan dengan Tiama Tumangger
Sebelah Selatan berbatasan dengan Arisman Sinaga
Sebelah Barat berbatasan dengan Kebun Pangat

Demikianlah Surat Keterangan ini dibuat dengan sebenarnya dan diberikan kepada yang bersangkutan untuk dapat dipergunakan seperlunya.

Catatan
Apabila terdapat kekeliruan dalam penetapan Surat Keterangan Tanah ini maka akan diadakan perbaikan sebagaimana mestinya.

Dikeluarkan di : Kampung Bawan
Pada Tanggal : 26-2-2015





KECAMATAN : SULTAN DAULAT
KOTA : SUBULUSSALAM
PROVINSI : NANGGROE ACEH DARUSSALAM

SURAT KETERANGAN TANAH

© Hak Cipta milik UIN Suska Riau

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

State Islamic University of Sultan Syarif Kasim Riau

: SALMUDIN SYAH (EDI GAYO)
: Laki-laki
: 32 Tahun
: Petani
: Indonesia
: Jambi Baru, Kecamatan Sultan Daulat
: 188 x 250 m (4,7 Ha)
: Wilayah Pasir Belo

Keadaan Tanah Pertanaman :

Berbatas dengan :

- Sebelah Barat berbatas dengan : Jalan Kuta Cane – Subulussalam
- Sebelah Timur berbatas dengan : Jalan Cok
- Sebelah Utara berbatas dengan : Sdr. Ilin
- Sebelah Selatan berbatas dengan : Sdr. Undang Kudadiri

8. Tanah tersebut ditaksir mempunyai harga Rp.

9. Keterangan Lain-lain :

UIN SUSKA RIAU

Demikian Surat Keterangan ini dibuat dan diberikan kepada yang bersangkutan untuk dapat dipergunakan selanjutnya.

Pasir Belo, 5 Maret 2008

Kepala Desa Pasir Belo

Kecamatan Sultan Daulat





© Hak cipta milik UIN Suska Riau

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumunkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

State Islamic University of Sultan Syarif Kasim Riau

SURAT KETERANGAN.

Nomor : 22/Skt/98

Kepala Desa Bawan Kecamatan Simpang Kiri Kabupaten Aceh Selatan menerangkan bahwa :

N a m a : BIDAR SINAGA, SH.
 U m u r : 39 tahun.
 Pekerjaan : Pegawai Negeri Sipil.
 Tempat tinggal : Kel.Lhok Bangkuang Kec.Tapak Tuan.

dia memiliki sebidang tanah di Desa Bawan Kecamatan Simpang Kiri yang berbatas sebagai berikut :

Belah Utara dengan Kebun Manang Manik.
 Belah Timur dengan Sungai Bawan.
 Belah Selatan dengan
 Belah Barat dengan Kebun Pangat.

Tanah tersebut dengan sepengetahuan kami dibuka sendiri oleh yang bersangkutan seluas 9 (sembilan) Hektar untuk dimiliki menjadi kebun sendiri, dan pihak kami tidak menaruh keberatan dan mendukung sepenuhnya untuk dijadikan kebun milik sendiri.

Surat Keterangan ini kami perbuat untuk sementara waktu sebelum Surat Keterangan Tanah (SKT) untuk itu belum kami urus dan akan kami urus kemudian hari, Surat Keterangan ini berlaku sebagai Surat Keterangan Tanah (SKT).

Demikianlah Surat Keterangan ini kami perbuat dengan sebenarnya agar dapat dipergunakan seperlunya.

Desa Bawan, 10 Maret 1998.-

KEPALA DESA BAWAN KEC.SIMPANG KIRI,

Saksi-saksi :

1. Ranang Manik
2. M. Rasyid
3. Pangat

Tanda tangan yang memiliki kebun tersebut



SURAT KETERANGAN

Perkelo Jurnal Hukum Islam dengan ini menerangkan bahwa:

: HANALDI SYAH

: 11427100477

: ILMU HUKUM

: KEWENANGAN BADAN PERTANAHAN NASIONAL KOTA SUBULUSSALAM DALAM MENANGANI KASUS PERTANAHAN AKIBAT KONFLIK MENURUT PERATURAN PRESIDEN NOMOR 20 TAHUN 2015 TENTANG BADAN PERTANAHAN NASIONAL

Pembimbing : Roni Kurniawan, SH.,MH

Pada tersebut diatas telah menyerahkan jurnal Skripsi sesuai dengan pedoman yang telah ditetapkan.

Pekanbaru, 11 Januari 2020

An. Pimpinan Redaksi

M. Atpi Syahrin, SH., MH., CPL

NIP. 198804302019031010

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.



© Hak cipta milik UIN Suska Riau

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

foto lahan di desa

State Islamic University of Sultan Syarif Kasim Riau





© Hak cipta milik UIN Suska Riau

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.



State Islamic University of Sultan Syarif Kasim Riau



© Hak cipta milik UIN Suska Riau



State Islamic University of Sultan Syarif Kasim Riau

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

BIODATA PENULIS



Penulis bernama Hanaldi sayah lahir di Medan pada tanggal 25 Februari 1996. Anak pertama dari lima bersaudara dari pasangan Bapak Ngateman dan Ibu Juriyah Hatisyah. Pada tahun 2003 Penulis Memulai pendidikan di Sekolah Dasar (SD) Negeri Sultan Daulat Kota Subulussalam. Lulus Pada Tahun 2008, kemudian melanjutkan pendidikan Sekolah Menengah Pertama (SMP), di SMP Negeri 1 Peunaron. Setelah lulus pada tahun 2011, Penulis melanjutkan pendidikan Sekolah Menengah Atas (SMA) Di SMA Negeri 1 Sultan Daulat Kota Subulussalam. Lulus pada tahun 2014, Berkat restu serta doa dari orang tua dan atas izin Allah SWT, Penulis melanjutkan pendidikan Strata 1 (S1) di Universitas Islam Negeri Sultan Syarif Kasim Riau, Fakultas syariah dan Hukum, dengan Program Pendidikan Ilmu Hukum.

Selama Menjadi Mahasiswa, Penulis melaksanakan Magang di Pengadilan Tata Usaha Yang bertempat Di Pekanbaru selama dua (2) bulan. Penulis juga melaksanakan Kuliah Kerja Nyata (KKN) di Desa Cinta Damai Kecamatan Tapung Hilir Kabupaten Kampar. Organisasi yang diikuti Internal Sebagai HMJ Ilmu hokum bidang pengembangan Sumber Daya Manusia, organisasi External LK 1 Himpunan Mahasiswa Islam (HMI) cabang Pekanbaru. Atas Berkat Rahmad Allah yang Maha Pengasih Lagi Maha Penyayang, Akhirnya Penulis mampu Menyelesaikan Skripsi Yang Berjudul “KEWENANGAN BADAN PERTANAHAN NASIONAL KOTA SUBULUSSALAM DALAM MENANGANI KASUS PERTANAHAN AKIBAT KONFLIK MENURUT PERATURAN PRESIDEN NOMOR 20 TAHUN 2015 TENTANG BADAN PERTANAHAN NASIONAL”. Dibawah arahan dan bimbingan langsung oleh Bapak Roni Kurniawan. SH.,MH. Berdasarkan hasil ujian Sarjana Fakultas Syariah dan Hukum tanggal 12 desember 2019, Penulis dinyatakan Lulus dan berhak menyandang gelar Sarjana Hukum (SH).